



**Analisis Pola Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(Tahun 2007 – 2009)**

SKRIPSI

Oleh :

Fieranita Widyaningtyas
NIM. 060810391132

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2011**



**Analisis Pola Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(Tahun 2007 – 2009)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Fieranita Widyaningtyas
NIM. 060810391132

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2011**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fieranita Widyaningtyas

NIM : 060810391132

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “*Analisis Pola Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007 - 2009*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juli 2011

Yang menyatakan,

Fieranita Widyaningtyas
NIM. 060810391132

PERSEMBAHAN

Dengan Segala Kerendahan Hati Yang Tak Terhingga, Kuucapkan Rasa Syukurku
Kepada Allah SWT, Kepada-Nya Tergantung Segala Sesuatu.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ayahanda Totok Subiantoro, Ibunda Sri Sudarti dan semua keluargaku, terima kasih
atas segala kasih sayang, pengorbanan dan ketabahannya dalam memberikan
dukungan serta selalu mendampingi dengan do'a
sehingga membawaku menuju kekesuksesan dalam hidup ini.

Almamater yang kubanggakan.

SKRIPSI

**Analisis Pola Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(Tahun 2007 - 2009)**

Oleh

Fieranita Widyaningtyas

Nim: 060810391132

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Novi Wulandari, SE, M. Acc & Fin, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Nining Ika Wahyuni, SE, M. Sc, Ak

**LEMBAR PERSETUJUAN
UNTUK UJIAN SKRIPSI DAN PENDADARAN**

Judul Skripsi : Analisis pola pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Tahun 2007-2009)
Nama : Fieranita Widyaningtyas
NIM : 060810391132
Jurusan : Akuntansi
Disetujui Tanggal : 13 Juli 2011

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Novi Wulandari, SE, M. Acc & Fin, Ak
NIP. 198011272005012003

Nining Ika Wahyuni, SE, M. Sc Ak
NIP.198306242006042001

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Alwan S. Kustono, SE, M. Si., Ak.
NIP. 197204162001121001

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.

(QS. Ar-Ra'd: 11)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka meyerah

(Thomas Alva Edison)

Bekerjalah kamu dengan sepenuh hati, karena di dunia ini orang yang tidak menyukaimu lebih banyak daripada orang yang akan menyukaimu

(Sri Sudarti, My Mother)

***Analisis Pola Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(Tahun 2007-2009)***

Fieranita Widyaningtyas

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menelaah pola pengungkapan tanggung jawab sosial melalui tema, lokasi dan tipe pengungkapan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. (2) mengetahui bagaimana teori pendukung, hasil survey atau beberapa penelitian tentang pola pengungkapan tanggung jawab sosial. Analisis yang digunakan yaitu riset kepustakaan dengan analisis informasi. Riset kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip dan buku tentang pendapat atau teori yang sedang diteliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan tahunan perusahaan dalam kategori runtun waktu (*times series*) Tahun 2007 sampai dengan 2009.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia telah mengungkapkan tema tanggung jawab sosial dan lingkungannya meskipun bobot nilainya berbeda-beda. Berdasarkan penelitian dalam laporan tahunan tahun 2007, pola pengungkapan yang banyak dipilih oleh perusahaan adalah penggunaan lokasi CSR secara tersendiri dan untuk tipe memilih kualitatif naratif. Sedangkan tahun 2008, pola pengungkapan yang banyak dipilih perusahaan adalah penggunaan lokasi CSR secara tersendiri dan tipe kuantitatif non moneter. Pada tahun 2009 lokasi pengungkapan yang dipilih paling banyak adalah lokasi CSR dan untuk tipe pengungkapan dipilih paling banyak adalah kuantitatif non moneter.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemilihan pola pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan melalui tema, tipe dan lokasi pengungkapan sangat berhubungan dengan teori stakeholders, teori legitimasi, dan teori agensi serta teori ekonomi politik. Hal itu dikarenakan keseluruhan teori di atas saling mempengaruhi dan mendukung pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan.

Kata kunci : Tanggung Jawab Sosial, Tema, Lokasi dan Tipe

Pattern Analysis of Corporate Social Responsibility Disclosure
Registered companies in the Indonesia Stock Exchange
(2007-2009)

Fieranita Widyaningtyas

Accounting Department, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACTION

This study aims to: (1) examined patterns of disclosure of social responsibility through the theme, location and type of disclosure in companies listed on stock exchanges of Indonesia. (2) knowing how to support the theory, survey results or some research on patterns of social responsibility disclosure. The analysis used the research literature with analysis of information. Library research done by collecting data through a written heritage, especially archives and books about the opinion or theory being studied. The data used in this research is secondary data which is the company's annual report in the category of time series (times series) of 2007 to 2009.

The results analysis showed that most of the companies listing on the Indonesia Stock Exchange has revealed the theme of social responsibility and environmental values despite different weights. Based on research in the annual report of 2007, the pattern selected by the disclosure that many companies are using CSR as a separate location and to choose the type of qualitative narrative. Whereas in 2008, the pattern of expression that has been chosen companies are using CSR as a separate location and type of non-monetary quantitative. In 2009, the disclosure of the selected location is the location of most types of disclosure of CSR and to choose the most are non-monetary quantitative.

The results of data analysis showed that the selection pattern of disclosure of corporate social responsibility through the theme, type and location of disclosure is associated with stakeholder theory, legitimacy theory, and agency theory and the theory of political economy. That's because the whole theory on mutual influence and support the importance of the implementation of corporate social responsibility.

Key words : Corporate Social Responsibility, Theme, Location and Type

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Skripsi dengan judul ” **Analisis Pola Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Tahun 2007 - 2009)** ” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember telah dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Novi Wulandari, SE, M. Acc & Fin, Ak, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Nining Ika Wahyuni, SE, M. Sc Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Saleh, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Alwan S. Kustono, SE, M. Si., Ak, selaku ketua jurusan Akuntansi Program S-1 Reguler Sore Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Ayahanda Totok Subiantoro dan Ibunda Sri Sudarti, terima kasih untuk doa, dukungan, perhatian, kasih sayang, kerja keras dan kesabarannya selama ini;
7. Adekku satu-satunya Prytha Iswardany, terima kasih selama ini telah mengantarkan aku kemanapun dan mendukungku. ”Salam Lestari...”
8. Terima kasih banyak untuk Mama Nik, Pak Yoko, Rama, Putri, dan seluruh Keluargaku yang tidak dapat aku sebutkan satu- satu.

9. Yang selalu berada di sampingku, ENDRA TRY YULIANTO, terima kasih sudah menemani aku baik suka maupun duka.
10. Seluruh keluarga H. Sudjoto, terimakasih atas doa selama ini;
11. Seluruh peliharanku PikoChan, TaRRa, BeLLa, Bejo, Kuku, BoNa, yang telah memberikan angin segar disela-sela hidupku;
12. Seluruh sahabat-sahabatku Akuntansi S1- Reguler Sore angkatan 2006 tanpa terkecuali. Jagalah hubungan kita sampai kapanpun, kalian telah memberi warna bagi hidupku. Terutama untuk Mbak Maria, Dek Indri, Mama Nilam, Mama Yossy, Tante Nurul, Cece, Widya, Abang Dikri. Jagalah terus hubungan kita
13. Seluruh Saudaraku HIMARES. Ima, Praya, Mas lalu, Mas Aryo, Papi, Ni'am, Mas Tyo, Hari, Candra, Randi Kebo. Meski telah menjadi kenangan, ingatlah kita pernah bersama dalam satu visi dan misi;
14. Almamaterku tercinta dan orang-orang di dalamnya. SDN Kepatihan XVI, SMPN 1 Jember dan SMU 1 Jember yang telah memberikan ilmu tak ternilai harganya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penyusun tulis satu persatu dan secara tidak langsung telah memberikan andil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membaca.

Jember, 13 Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengungkapan(Disclosure) dalam Laporan Keuangan	6
2.1.1.1 Pengertian Pengungkapan	6
2.1.1.2 Tujuan Pengungkapan	7

2.1.1.3 Informasi yang Harus Diungkapkan	8
2.1.1.4 Kualitas Informasi	9
2.1.2 Akuntansi Sosial	10
2.1.3 Pelaporan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.....	11
2.1.3.1 Pengertian	11
2.1.3.2 Karakteristik Tanggung Jawab Sosial	12
2.1.3.3 Kategori Tanggung Jawab Sosial	13
2.1.3.4 Pengukuran dan Pelaporan Tanggung Jawab Sosial	15
2.1.3.5 Aktivitas Tanggung Jawab Sosial	17
2.1.4 Perkembangan Tanggung Jawab Sosial	18
2.1.4.1 Perkembangan Tanggung Jawab Sosial di Manca Negara	18
2.1.4.2 Perkembangan Tanggung Jawab Sosial di Indonesia	22
2.1.4.3 Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dalam Prespektif Islam	25
2.1.4.4 Regulasi Tanggung Jawab Sosial di Indonesia	28
2.1.4.5 Pentingnya Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial	36
2.1.4.6 Manfaat Tanggung Jawab Sosial	40
2.1.4.7 Hambatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial	44
2.1.5 Tipe Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	46
2.1.6 Tema Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	47
2.1.7 Lokasi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	48
2.1.8 Teori Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	48
2.2 Penelitian Terdahulu	50

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	52
3.2 Pengumpulan Data	52
3.3 Metode Pengumpulan Informasi	53
3.4 Bentuk Analisis Informasi dan Analisis Informasi	54
3.4.1 Bentuk Analisis Informasi	54
3.4.2 Analisis Informasi	55

3.5 Kerangka Pemecahan Masalah	56
--------------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Indonesia	57
4.2 Gambaran Obyek Penelitian.....	61
4.3 Tema Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	62
4.4 Lokasi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	67
4.5 Tipe Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
5.3 Keterbatasan	78

Daftar Pustaka
Lampiran - Lampiran

DAFTAR GAMBAR

4.1 Lokasi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	69
4.3 Tipe Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	74

DAFTAR TABEL

2.1 Kategori dalam Corporate Sustainability Reporting	21
2.2 Sinergi Hubungan Antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat	45
4.1 Contoh Pelaksanaan CSR di Indonesia beserta Manfaatnya	61
4.2 Perusahaan yang Mengungkapkan tanggung Jawab Sosial.....	64
4.3 Jumlah Perusahaan yang Mengungkapkan Tanggung Jawab Sosial.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Daftar nama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah mengungkapkan tanggung jawab sosial
- B. Hasil perhitungan lokasi dan tipe pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tahun 2007, 2008, dan 2009
- C. Hasil perhitungan item tema pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tahun 2007, 2008, dan 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sosial dan lingkungan merupakan faktor penting yang harus segera dipikirkan. Hal ini dikarenakan makin banyaknya dampak negatif yang dihasilkan akibat buruknya pengelolaan lingkungan dan ketidakpekaan perusahaan terhadap masyarakat sosialnya. Gejala ini dapat dilihat dari berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Contohnya kasus pencemaran teluk buyat oleh PT Newmont dan kasus lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo yang tidak hanya menjadi kasus personal perusahaan melainkan telah menjadi kasus nasional. Penanggulangan harus segera dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial tersebut antara lain pengurangan emisi karbon, memperhatikan tingkat kesejahteraan karyawan, dan pelatihan, serta pengurangan pemakaian plastik yang tidak bisa didaur ulang.

Keengganan para pelaku ekonomi memperhatikan aspek konservasi lingkungan dan sosial biasanya berpangkal pada anggapan bahwa biaya untuk menjaga lingkungan tidak memberikan keuntungan balik secara ekonomis. Intinya, mengurus lingkungan dan sosial dipandang hanya menambah beban biaya perusahaan.

Perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi di dalam melaksanakan kinerja ekonominya juga dituntut untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitarnya. Hal ini mendorong munculnya suatu pandangan bahwa tujuan perusahaan tidak lagi semata-mata memaksimalkan laba tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sosial dan pengelolaan lingkungan yang baik.

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan pertanggungjawaban kinerja ekonomi perusahaan kepada para investor, kreditor, dan pemerintah. Laporan keuangan dapat dikelompokkan dalam pengungkapan yang sifatnya wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang

sifatnya sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh setiap perusahaan atau institusi yang berisi tentang hal-hal yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan menurut standar yang berlaku. Sedangkan pengungkapan yang bersifat sukarela ini tidak disyaratkan oleh standar, tetapi dianjurkan dan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang melakukannya.

Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Sejauh ini perkembangan akuntansi konvensional (*mainstream accounting*) telah banyak di kritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai *Social Responsibility Accounting (SRA)* atau Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial. Tanggungjawab sosial diartikan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab pada tindakan yang mempengaruhi konsumen, masyarakat, dan lingkungan (Ivancevic, 1992 dalam Rosmasita 2007). Selama ini produk akuntansi dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik saham, kini paradigma tersebut diperluas menjadi pertanggungjawaban kepada seluruh *stakeholders*.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan merupakan salah satu cara perusahaan mengkomunikasikan kinerja sosial dan lingkungannya kepada pihak luar. Laporan tahunan seharusnya mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan. Pengungkapan keuangan dapat berupa pengorbanan yang telah dilakukan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan, pengorbanan yang kemungkinan akan ditanggung oleh perusahaan akibat kegiatannya maupun pengorbanan yang harus ditanggung dan kemungkinan akan ditanggung oleh masyarakat akibat dari aktivitas perusahaan (Sudarno, 2004).

Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Perusahaan akan mempertimbangkan

biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkannya maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut.

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja, tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain finansial juga ada sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya (Nurlela, 2006).

Dalam sebuah pengungkapan tanggung jawab sosial, masing-masing entitas menggunakan polanya tersendiri. Pengungkapan tema, lokasi dan tipe pengungkapan yang beragam membuat adanya perbedaan pola pengungkapan tanggung jawab sosial. Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2, terdapat tujuh tema yang kemudian dirinci lagi menjadi 78 item. Tersedia pula lokasi pengungkapan tanggung jawab sosial yang beragam, mulai dari pengungkapan di *overview*, surat dari dewan komisaris, surat dari dewan direksi, catatan atas laporan keuangan dan lokasi lainnya. Serta penggunaan tipe pengungkapan dengan bentuk kualitatif naratif, kuantitatif non-moneter dan kuantitatif moneter.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Masnila (2006). Masnila meneliti tinjauan atas praktek pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dipandang dari sudut akuntansi. Penelitian ini menganalisis penyajian aktifitas *Corporate Social Responsibility* dalam Laporan Keuangan pada seluruh perusahaan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui pengungkapan tema, lokasi, dan tipe pengungkapannya. Penelitian ini juga menjelaskan dan memaparkan beberapa hasil survey tentang *Corporate Social Responsibility* yang ada di Indonesia. Hasilnya beberapa perusahaan telah menunjukkan berbagai bentuk aktivitas tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat dan lingkungan. Serta beberapa perusahaan telah menyediakan halaman khusus sebagai tempat mengungkapkan aktivitas perusahaan berkaitan dengan permasalahan sosial, masyarakat dan lingkungan.

Atas dasar penelitian di atas tersebut, peneliti ingin menganalisis pola pengungkapan perusahaan dalam menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kepentingan sosial. Informasi sosial yang ditelaah melalui tema, tipe dan lokasi pengungkapan yang dipilih oleh entitas bisnis atau industri dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada tahun penelitian yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009 serta penambahan lokasi pengungkapan tanggung jawab sosial. Penambahan lokasi ini disebabkan oleh perkembangan tanggung jawab sosial yang semakin dirasa penting oleh suatu entitas bisnis bagi keberlangsungan usahanya. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil judul : “Analisis Pola Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Tahun 2007-2009).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana pola pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007, 2008 dan 2009 dilihat melalui tema, lokasi dan tipe yang diungkapkan serta bagaimana hasil survey dan beberapa penelitian tentang pola pengungkapan tanggung jawab sosial.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menelaah pola (tema, lokasi, tipe) pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007, 2008 dan 2009.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain adalah :

1) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk penelitian dalam bidang yang sama dan juga memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2) Bagi perusahaan Emiten

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia tentang pola tanggung jawab sosial dan pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan agar perusahaan dapat mendapat legitimasi oleh masyarakat.

3) Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada investor yang ada di Bursa Efek Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengungkapan (*Disclosure*) dalam Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Pengungkapan

Kata pengungkapan atau *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat tentang kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ghozali dan Chairi, 2001 dalam Widayanti, 2006).

Pengertian pengungkapan dalam pelaporan keuangan merupakan penyajian informasi yang diperlukan untuk berlangsungnya pasar modal yang efisien secara optimum. Hal ini berarti bahwa informasi yang diberikan harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha (Tuanakotta, 2000).

Penjelasan di PSAK No.1 (IAI, 2007) memperlihatkan bahwa pengungkapan terdapat pada catatan atas laporan keuangan yang disajikan secara sistematis dan tidak terpisahkan dari laporan keuangan serta mengungkapkan :

- 1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- 2) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

- 3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam penyajian secara wajar .

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan. Penjelasan tersebut ditulis dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2007, paragraph kesembilan :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

2.1.1.2 Tujuan Pengungkapan

Tujuan pengungkapan laporan keuangan sendiri adalah untuk memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga dapat berguna dalam membuat keputusan yang terbaik dengan cara menyajikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi tersebut (Tuanakotta, 2000). Belkaoui (2000) mengemukakan tujuan pengungkapan ada enam yaitu :

- 1) Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
- 2) Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
- 3) Untuk menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menentukan resiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.
- 4) Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan di setiap tahunnya.

- 5) Untuk menyediakan informasi mengenai aliran arus kas masuk dan aliran kas keluar di masa datang
- 6) Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya.

Sedangkan tujuan pengungkapan menurut *Securities Exchange Commission* (SEC) dikategorikan menjadi dua yaitu :

- a) *Protective Disclosure*, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor.
- b) *Informative Disclosure*, yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan keuangan.

2.1.1.3 Informasi yang Harus Diungkapkan

Sebuah perusahaan harus tahu informasi apa yang harus diungkapkan dan informasi apa yang tidak perlu untuk diungkapkan. Menurut Tuanakotta (2000) terdapat tiga konsep dalam pengungkapan laporan keuangan, yaitu :

- 1) Pengungkapan yang cukup (*adequate Disclosure*)

Merupakan pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan yang disajikan tidak menyesatkan. Pada tingkat pengungkapan ini investor dapat menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan yang benar.

- 2) Pengungkapan yang wajar (*fair Disclosure*)

Merupakan pengungkapan yang didalamnya terdapat tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama pada semua pihak yang merupakan pembaca potensial dari laporan keuangan.

- 3) Pengungkapan yang lengkap (*full Disclosure*)

Merupakan suatu penyajian semua informasi yang relevan. Tetapi juga dapat diartikan sebagai penyajian informasi secara berlebihan sehingga dapat menyesatkan para pengguna informasi tersebut dan akan mengaburkan informasi yang signifikan serta membuatnya menjadi sulit ditafsirkan.

Sedangkan jika dikaitkan dengan persyaratan yang dihubungkan dengan standar terdapat dua jenis pengungkapan yaitu :

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan wajib merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap adanya kemungkinan kegagalan pengungkapan yang cukup oleh perusahaan, yang nantinya dikhawatirkan mengakibatkan kegagalan pasar.
2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan butir-butir yang diungkapkan secara sukarela untuk perubahan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

2.1.1.4 Kualitas Informasi yang Seharusnya Diungkapkan

Pedoman umum tentang kualitas informasi yang harus diungkapkan terdapat dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, supaya informasi yang diungkapkan berguna bagi para pemakainya maka harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu :

- 1) Dapat dipahami (*understandability*)
Kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Maksudnya pemakai diasumsikan dapat memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar
- 2) Relevan (*relevance*)
Informasi dapat dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi pemakainya untuk membantu mengevaluasi masa lalu, sekarang dan masa depan, sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai kebutuhan pemakainya, relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya.
- 3) Keandalan (*reliability*)

Informasi memiliki karakteristik keandalan jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Syarat sebuah informasi yang andal adalah penyajian informasi yang jujur sehingga keputusan yang diambil nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Serta substansi mengungguli bentuk, yang artinya bahwa informasi yang disajikan harus sesuai dengan substansi realitasnya dan bukan hanya bentuk hukumnya.

4) Dapat dibandingkan (*comparability*)

Pemakai informasi harus dapat memperbandingkan laporan keuangannya dengan laporan keuangan perusahaan lain untuk dapat mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja karyawan.

2.1.2 Akuntansi sosial

Perkembangan praktek tanggung jawab sosial perusahaan selanjutnya tidak lepas dari peran akuntansi. Hal ini dikarenakan bidang akuntansi akan merespon perkembangan filosofi manajemen sehingga mempunyai lingkup yang lebih luas disebut juga akuntansi sosial. Untuk mendapatkan gambaran tentang akuntansi sosial, entitas bisnis harus mampu mengakses lingkungan sosialnya. Setelah itu untuk menindak lanjuti dan mengukur kepekaan tersebut perusahaan memerlukan informasi secara periodik, sehingga informasi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap semua pihak.

Belkaoui (2000) dalam Widayanti (2006) menyatakan bahwa akuntansi sosial ekonomi adalah mengidentifikasi, menilai, mengukur aspek penting dari kegiatan sosial ekonomi perusahaan dan negara dalam memelihara kualitas hidup masyarakat sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Mobly (1984) dalam Mashita (2006) memberikan arti akuntansi sosial ekonomi sebagai kegiatan menyusun, mengukur dan menganalisa akibat sosial dan ekonomi dari perilaku perusahaan dan pemerintah.

Akuntansi sosial dilaksanakan atas dasar aktivitas sosial yang dijalankan entitas bisnis, selanjutnya diproses berdasarkan prinsip, metode dan konsep akuntansi untuk diungkapkan bagi pihak yang berkepentingan, kemudian dari informasi yang dihasilkan, pengguna informasi akan dapat menentukan kebijakan selanjutnya untuk aktivitas sosial dan kebijakan untuk lingkungan sosial entitas bisnis yang dijalankan. Kondisi ini menuntut suatu entitas bisnis untuk mampu mengakses kepentingan lingkungan sosialnya yang nantinya akan diikuti pengungkapan dan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga melahirkan sebuah laporan yang mendeskripsikan segala aspek yang mendukung kelangsungan hidup suatu entitas. (Maksum dan Kholis, 2003).

2.1.3 Pelaporan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

2.1.3.1 Pengertian

Perluasan dalam pengungkapan atau *disclosure* berarti memperluas tanggung jawab perusahaan di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya untuk mencari laba bagi pemegang saham.

Pengungkapan tanggung jawab sosial (*social disclosure*) merupakan produk dari akuntansi sosial (*social accounting*). Akuntansi sosial yang masih merupakan bidang baru dalam ilmu akuntansi ini lahir dan berkembang karena terjadinya perubahan paradigma pertanggungjawaban. Bila dahulu laporan tahunan (*annual report*) sebagai produk akuntansi, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham (*stockholders*), kini paradigma tersebut diperluas menjadi pertanggungjawaban kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholders*) (Utomo, 2000 dalam Widayati, 2006).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas hidup dari

karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya (CSR: *Meeting Changing Expectations*, 1999). Terdapat kecenderungan utama yang semakin menegaskan arti penting CSR, yaitu :

- a) Meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin
- b) Posisi Negara yang semakin berjarak pada rakyatnya
- c) Makin mengemukanya arti kesinambungan
- d) Makin gencarnya sorotan kritis dan resitensi dari publik
- e) Trend kearah transparansi apalagi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- f) Harapan-harapan terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi

Sedangkan definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam draft International Standard ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility*, 2009 yang nantinya bakal berlaku mulai september 2010 :

“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.”

2.1.3.2 Karakteristik Tanggung Jawab Sosial

Pada dasarnya kegiatan CSR sangat beragam bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela di dasarkan pada moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, didalam praktek penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Menurut Carrol (1991) dalam Maksum dan Kholis (2003), secara konseptual telah mengklasifikasikan tanggung jawab sosial perusahaan. Karakteristik tanggung jawab sosial perusahaan yang didasarkan pada empat tipe perusahaan adalah senagai berikut :

- 1) Tipe perusahaan reaktif dengan karakteristik :
 - a) Tidak ada dukungan dari manajemen
 - b) Manajemen merasa entitas sosial itu tidak penting
 - c) Tidak ada perhatian tentang lingkungan sosial perusahaan
 - d) Tidak ada dukungan pelatihan tentang entitas sosial kepada karyawan
- 2) Tipe perusahaan defensive dengan karakteristik :
 - a) Isu lingkungan sosial hanya diperhatikan jika dianggap perlu
 - b) Sikap perusahaan tergantung pada kebijakan pemerintah tentang dampak lingkungan sosial yang harus dilaporkan
 - c) Sebagian kecil karyawan mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan
- 3) Tipe perusahaan akomodatif dengan karakteristik :
 - a) Terdapat beberapa kebijakan top manajemen tentang lingkungan sosial
 - b) Kegiatan akuntansi sosial dilaporkan secara internal dan sebagian kecil secara eksternal
 - c) Terdapat beberapa karyawan mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan.
- 4) Tipe perusahaan proaktif dengan karakteristik :
 - a) Top manajemen mendukung sepenuhnya mengenai isu-isu lingkungan sosial perusahaan
 - b) Kegiatan akuntansi sosial dilaporkan baik secara internal maupun eksternal
 - c) Kegiatan akuntansi sosial dilaporkan secara berkesinambungan.

2.1.3.3 Kategori dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) mengatakan bahwa *Corporate Sustainability Reporting* terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Sedangkan Zhegal & Ahmed (1990) dalam Anggraini

(2006) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu :

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.
2. Energi, meliputi penggunaan energy daur ulang, efisiensi energi, dll.
3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial
4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.
5. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll.

Kategori	Aspek
Kinerja Ekonomi	
Pengaruh ekonomi secara langsung	Pelanggan, pemasok, karyawan, penyedia modal dan sektor publik
Kinerja Lingkungan	
Hal-hal yang terkait dengan lingkungan	Bahan baku, energi, air, Keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>), emisi, sungai, dan sampah, pemasok, produk dan jasa, pelaksanaan, dan angkutan
Kinerja Sosial	
Praktik Kerja	Keamanan dan keselamatan tenaga kerja, pendidikan dan <i>training</i> , kesempatan kerja

Hak manusia	Strategi dan manajemen, non diskriminasi, kebebasan berserikat dan berkumpul, tenaga kerja di bawah umur, kedisiplinan, keamanan, dll.
Sosial	Komunitas, korupsi, kompetisi dan penetapan harga
Tanggung jawab terhadap produk	Kesehatan dan keamanan pelanggan, iklan yang peduli terhadap hak pribadi

Tabel 2.1 Kategori dalam *Corporate Sustainability Reporting*
Sumber: Darwin (2004)

2.1.3.4 Pengukuran dan Pelaporan Tanggung Jawab Sosial

Pertukaran yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya menyebabkan dua dampak yaitu dampak negative yang disebut dengan pengorbanan social (*social cost*) dan dampak positif yang disebut dengan manfaat social (*social benefit*). Pengukuran dalam laportan pertanggungjawaban sosial merupakan masalah yang timbul terutama dalam kaitannya dengan hal-hal yang tidak dapat diukur dengan menggunakan bentuk pengukuran yang telah digunakan dalam akuntansi.

Estes dalam Masnila (2006) mengusulkan beberapa teknik pengukuran manfaat dan biaya sosial yaitu:

a) Penilaian pengganti (*Surrogate Valuation*).

Metode Penilaian Pengganti (*Surrogate Valuation*) menyatakan bahwa suatu nilai ganti terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dapat dipilih sebagai cara menghitung kerugian saat nilai kerugian yang diinginkan tidak dapat dipenuhi secara langsung.

b) Teknik survey (*Survey Techniques*).

Teknik Survei (*Survey Techniques*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada masyarakat apa yang sangat

berharga bagi mereka. Cara ini merupakan pendekatan survei yang tidak menyenangkan, namun dalam kenyataannya memberikan informasi yang lebih berharga dan lebih akurat dan sekaligus merupakan teknik yang mahal.

c) Biaya perbaikan dan pencegahan (*Restoration or Avoidance Cost*).

Merupakan suatu cara untuk mengukur biaya sosial dengan memperkirakan pengeluaran uang yang sesungguhnya untuk mencegah atau menghindari bahaya atau kerusakan lingkungan.

d) Penilaian (*Appraisal*) oleh tim independen.

Penaksiran (*Appraisal*) merupakan penaksiran yang dilakukan oleh pihak independen dalam menilai barang berwujud seperti bangunan dan tanah. Teknik ini hampir sama dengan penilaian pengganti, hanya disini menggunakan tenaga ahli sebagai pihak penaksir independen

e) Putusan pengadilan (*Court Decisions*).

Putusan Pengadilan (*Court Decisions*) merupakan cara untuk menilai atau menghitung kerusakan atau biaya tertentu melalui putusan pengadilan. Penilaian ini akurat dalam jumlah dan diidentifikasi dengan menggunakan biaya sosial yang khusus.

f) Analisa (*Analisis*).

Pendekatan Analisis (*Analisis*) dilakukan melalui analisa ekonomi dan statistik terhadap data yang ada menghasilkan dalam suatu nilai yang sah dan pengukuran yang dapat dipercaya.

g) Biaya pengeluaran (*Outlay Cost*).

Biaya Pengeluaran (*Outlay Cost*) merupakan teknik yang digunakan untuk menilai program yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, seperti kegiatan pembaharuan urbanisasi, pertahanan militer, atau konstruksi jalan raya. Biaya pengeluaran dilakukan dengan mencari hubungan kegiatan tersebut secara langsung dan mengukur kegunaannya.

2.1.3.5 Aktivitas Tanggung Jawab Sosial

Ada berbagai pendapat mengenai aktivitas-aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas sosial yang menunjukkan bentuk keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat. Kotler dan Lee (2005) dalam Masnila (2006) merumuskan aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam 6 kelompok kegiatan :

a) *promotion,*

Aktivitas sosial yang dilakukan melalui *persuasive communications* dalam rangka meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan isu sosial yang sedang berkembang.

b) *marketing,*

Marketing, dilakukan melalui *commitment* perusahaan untuk menyumbangkan sebesar persentase tertentu hasil penjualannya untuk kegiatan social.

c) *corporate social marketing,*

Dilakukan dengan cara mendukung atau pengembangan dan atau penerapan suatu *behavior change* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

d) *corporate philanthropy,*

Corporate Philantropy, merujuk pada kegiatan yang diberikan langsung.

e) *community volunteering,*

Merupakan bentuk aktivitas social yang diberikan perusahaan dalam rangka memberikan dukungan bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dukungan tersebut dapat diberikan berupa keahlian, talenta, ide, dan atau fasilitas laboratorium.

f) *social responsibility business practices.*

Merupakan kegiatan penyesuaian dan pelaksanaan praktik-praktik operasional usaha dan investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan melindungi atau menjaga lingkungan, misalnya membangun fasilitas pengolahan limbah, memilih memilih supplier dan atau kemasan yang ramah lingkungan, dan lain-lain.

Berbeda dengan Kotler dan Lee, Menurut *the committee on Accounting for Corporate Social Performance of Nation Association of Accountants* (Yuniarti, 2002 dalam Masnila 2006) bentuk kegiatan sosial perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Keterlibatan komunitas (*Community Involvement*), mencakup aktivitas berbentuk donasi atau bantuan untuk kegiatan rohani, olahraga, bantuan bagi pengusaha kecil, pelayanan kesehatan masyarakat, bantuan penelitian dan sebagainya.
2. Sumberdaya manusia (*Human Resources*), meliputi program pendidikan dan pelatihan karyawan, fasilitas keselamatan kerja, kesehatan, kerohanian, serta tunjangan karyawan.
3. Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Fisik (*Environmental and Physical Resources*) terdiri dari antara lain keterlibatan perusahaan dalam pengolahan limbah, program penghijauan, pengendalian polusi, dan pelestarian
4. Kontribusi produk atau jasa (*Product or services contribution*), mencakup keamanan dan kualitas produk, kepuasan konsumen, dan sebagainya.

2.1.4 Perkembangan Tanggung Jawab Sosial

2.1.4.1 Perkembangan Tanggung Jawab Sosial di Manca Negara

Di tingkat internasional, ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di banyak sektor. Misalnya *Equator Principles* yang diadopsi oleh banyak lembaga keuangan internasional. Untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggung jawab, di level internasional perusahaan sebenarnya bisa menerapkan berbagai standard CSR seperti :

- a) *Accountability* standard, yang berdasar pada prinsip *Triple Bottom Line* (*Profit, People, Planet*) yang digagas oleh John Elkington
- b) *Global Reporting Initiative* (GRI), panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) dan UNEP pada tahun 1997

- c) *Social Accountability International standard*
- d) *ISO 14000 environmental management standard*, Standar manajemen lingkungan
- e) *ISO 26000 Guidance Standard on Social responsibility*.

Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial serta prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM). Bank-bank di Eropa menerapkan kebijakan dalam pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik. Sebagai contoh, bank-bank Eropa hanya memberikan pinjaman pada perusahaan-perusahaan perkebunan di Asia apabila ada jaminan dari perusahaan tersebut, yakni ketika membuka lahan perkebunan tidak dilakukan dengan membakar hutan.

Tren global lainnya dalam pelaksanaan CSR di bidang pasar modal adalah penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan CSR. Sebagai contoh, New York Stock Exchange memiliki *Dow Jones Sustainability Index (DJSI)* bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai corporate sustainability dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Begitu pula London Stock Exchange yang memiliki *Socially Responsible Investment (SRI) Index* dan *Financial Times Stock Exchange (FTSE)* yang memiliki *FTSE4 Good* sejak 2001 (Daniri, 2008).

Inisiatif ini mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia, seperti di *Hanseng Stock Exchange* dan *Singapore Stock Exchange*. Konsekuensi dari adanya indeks-indeks tersebut memacu investor global seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi yang hanya akan menanamkan dananya di perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam indeks.

Menghadapi tren global dan resistensi masyarakat sekitar perusahaan, maka sudah saatnya setiap perusahaan memandang serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya, serta berusaha membuat laporan setiap tahunnya kepada *stakeholdernya*. Laporan bersifat non financial yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi dan lingkungannya.

Di Uni Eropa pada tanggal 13 Maret 2007, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi berjudul *Corporate Social Responsibility: A new partnership* yang mendesak Komisi Eropa untuk meningkatkan kewajiban yang terkait dengan persoalan akuntabilitas perusahaan seperti tugas direktur (*directors duties*), kewajiban langsung luar negeri (*foreign direct liabilities*) dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (*environmental and social reporting*) (Akbar, 2007).

Di Inggris, sudah lama perusahaan diikat dengan kode etik usaha. Terdapat banyak aturan dan undang-undang yang mengatur praktik bisnis di Inggris, maka tidak diperlukan UU khusus CSR. Perusahaan- perusahaan di Inggris ini tidak lepas dari pengamatan publik (masyarakat dan negara) karena harus transparan dalam praktik bisnisnya. Publik bisa protes terbuka ke perusahaan jika perusahaan merugikan masyarakat, konsumen, buruh, lingkungan.

Melihat perkembangan ini, tahun lalu, disahkan *Companies Act 2006* yang mewajibkan perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek untuk melaporkan bukan saja kinerja perusahaan (kinerja ekonomi dan financial) melainkan kinerja sosial dan lingkungan. Laporan ini harus terbuka untuk diakses publik dan dipertanyakan. Dengan demikian, perusahaan didesak agar semakin bertanggung jawab.

Mac Oliver EA Marshal (*Company Law Handbook Series* dalam Daniri, 2007) berpendapat, perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri diharuskan melaksanakan *Sullivan Principal* dalam rangka melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, yaitu:

- 1) Tidak ada pemisahan ras (*non separation of races*) dalam makan, bantuan hidup dan fasilitas kerja.

- 2) Sama dan adil dalam melaksanakan pekerjaan (*equal and fair employment process*).
- 3) Pembayaran upah yang sama untuk pekerjaan yang sebanding (*equal payment compensable work*).
- 4) Program training untuk mempersiapkan kulit hitam dan non kulit putih lain sebagai supervisi, administrasi, klerk, teknisi dalam jumlah yang substansial.
- 5) Memperbanyak kulit hitam dan non kulit putih lain dalam profesi manajemen dan supervisi.
- 6) Memperbaiki tempat hidup pekerja di luar lingkungan kerja seperti perumahan, transportasi, kesehatan, sekolah dan rekreasi.

Implementasi CSR di beberapa negara bisa dijadikan referensi untuk menjadi contoh penerapan CSR. Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat telah mengadopsi *code of conduct* CSR yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan hak asasi manusia (HAM). Berbasis pada aspek itu, mereka mengembangkan regulasi guna mengatur CSR. Contohnya Australia mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan CSR dan mengatur standardisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM. Sementara itu, Kanada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan, dan penyelesaian masalah sosial.

Di beberapa negara dibutuhkan laporan pelaksanaan CSR, walaupun sulit diperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek sosial. Sementara aspek lingkungan dan aspek ekonomi memang jauh lebih mudah diukur. Banyak perusahaan sekarang menggunakan audit eksternal guna memastikan kebenaran laporan tahunan perseroan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan keberlanjutan. Akan tetapi laporan tersebut sangat luas formatnya, gayanya dan metodologi evaluasi yang digunakan walaupun dalam suatu industri yang sejenis (Daniri, 2008).

2.1.4.2 Perkembangan Tanggung Jawab Sosial di Indonesia

Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, *profit* besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi.

Sifat CSR yang sukarela dan absennya produk hukum yang menunjang serta lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Yang terpenting, perusahaan telah menampilkan laporan sosial tahunannya secara mengkilap, lengkap dengan tampilan foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Padahal untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR.

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat (Daniri, 2008).

Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi

organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya sosial bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Belakangan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemerintah memasukkan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kedalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (Daniri, 2007).

Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari pemerintah mengambil kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan *Pertama* adalah keprihatinan pemerintah atas praktek korporasi yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat. *Kedua* adalah sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standard aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional maupun local (Jalal, 2007).

Akibat kebijakan tersebut aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi tanggung jawab legal yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut. Tetapi dapat pula CSR akan bermakna sebatas upaya pencegahan dan dampak negatif keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya atau aktivitas CSR dengan regulasi seperti itu akan mengarahkan program pada formalitas pemenuhan kewajiban dan terkesan basa-basi . Padahal melihat perkembangan aktivitas CSR di Indonesia semakin memperlihatkan

semakin sinergisnya program CSR dengan beberapa tujuan pemerintah (Akbar, 2007).

Praktek CSR di Indonesia belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR semakin besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO. Dan diperkirakan pada akhir tahun 2009 mendatang akan diluncurkan *ISO 26000 on Social Responsibility*, sehingga tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas akan pentingnya program CSR dijalankan oleh perusahaan apabila menginginkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut.

Seberapa jauh CSR berdampak positif bagi masyarakat, amat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga lain, terutama pemerintah. Berbagai studi menunjukkan, keberhasilan program CSR selama ini justru terkait dengan sinergitas kerja sama perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Segitiga peran itu memungkinkan integrasi kepentingan atau program semua *stakeholders* pembangunan. Bahkan tidak jarang CSR menjadi semacam titik temu antara wilayah isu yang menjadi perhatian perusahaan, kepentingan riil masyarakat setempat, dan program pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan regional (Sampurna, 2007).

Untuk Indonesia, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten.

Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan

kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi satu pihak terhadap yang lain. Peran terakhir ini sangat diperlukan, terutama di daerah (Susiloadi, 2008).

Mengingat CSR sulit terlihat dengan kasat mata, maka tidak mudah untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang dicapai. Oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan untuk menjadikannya kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *Triple Bottom Line* atau *Sustainability Reporting*. Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya alam dapat dihitung dengan akuntansi sumber daya alam, sedangkan pengeluaran dan penghematan biaya lingkungan dapat dihitung dengan menggunakan akuntansi lingkungan (Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2006).

2.1.4.3 Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dalam Prespektif Islam

Tanggung jawab sangat terkait dengan hak dan kewajiban, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesadaran tanggung-jawab. Ada dua bentuk kesadaran: Pertama, kesadaran yang muncul dari hati nurani seseorang yang sering disebut dengan etika dan moral. Kedua, kesadaran hukum yang bersifat paksaan berupa tuntutan-tuntutan yang diiringi sanksi-sanksi hukum.

Ketidakseimbangan dalam tujuan ekonomi-sosial-lingkungan (*triple bottom line*) tersebut merupakan ironi bagi masyarakat Indonesia mengingat Indonesia dikenal dengan masyarakat religius, masyarakat yang berusaha menjaga keseimbangan ranah sosial dan lingkungan di samping pencapaian ekonomi. Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk Islam seakan hilang kendali dalam menjaga tataran keseimbangan tersebut (Wahyudi, 2010).

Perkembangan studi *corporate social responsibility* (CSR), perkembangan kapabilitas masyarakat sipil, dan kesadaran korporasi multinasional untuk peka sosial lingkungan belakangan ini, maka seharusnya peluang terciptanya dampak negatif dari operasional perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin dan segera memaksimalkan dampak positif (manfaat) untuk para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini pula

tergambar dalam berbagai *codes of conduct* etika bisnis. (Draft) ISO 26000, *Global Reporting Initiatives (GRI)*, *UN Global Compact*, *International Finance Corporation (IFC)*, dan lainnya telah menegaskan berbagai instrumen indikator bagi pelaksanaan komitmen CSR perusahaan demi pemenuhan target pembangunan berkelanjutan seperti isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, praktik operasional yang adil, dan pengembangan masyarakat. Dan bila ditilik lebih lanjut, sebenarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan representasi berbagai komitmen yang dapat bersinergi dengan pengamalan prinsip kehidupan Islami.

Dalam berbagai *codes of conduct* dinyatakan bahwa operasional perusahaan semestinya terbebas dari berbagai modus praktik korupsi (*fight against corruption*) dan memberi jaminan layanan maksimal sepanjang ranah operasionalnya, termasuk layanan terpercaya bagi setiap produknya (*provision and development of safe and reliable products*). Hal ini pula yang secara tegas tercantum dalam Al-Quran. Berikut adalah petikan yang bersumber pada Surat al-A'raf ayat 85, “.... Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya,....”

Aktivitas mengubah bentang alam demi memperoleh sumber daya alam seharusnya diikuti dengan kompensasi sosial dan fisik yang berimbang disertai perencanaan memadai dalam memperhitungkan kebutuhan sumberdaya alam generasi mendatang. Perhatian atas sumber daya alam direpresentasikan minimal sekitar 95 ayat dalam Al- Quran. Salah satunya Surat Al-Baqarah ayat 11, “.... Janganlah kamu membuat kerusakan di muka Bumi....”

Selain itu, isu perhatian sosial juga menjadi catatan tersendiri dalam studi CSR dan juga hadir dalam nilai-nilai Islam. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat lokal tergambar dalam aktivitas seperti pengakuan atas hak karyawan, keterbukaan informasi kegiatan perusahaan terhadap masyarakat (*prior informed consent*), maupun kegiatan pengembangan masyarakat dan kegiatan filantropi. Aktivitas kepedulian sosial tersebut diamanahkan dalam Surat Al-Hadid ayat

18, “*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, pria dan wanita, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak*” (Sampurna, 2007).

Dalam pemeliharaan harta, transaksi jual beli harus dilakukan secara halal. Jika tidak, maka eksistensi harta akan terancam, baik pengelolaan atau pemanfaatannya. Karena itu, pihak perusahaan dilarang melakukan kegiatan yang secara jelas melanggar aturan syara'. Dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), *maqashid as-yari'ah* ditujukan agar pelaku usaha atau pihak perusahaan mampu menentukan skala prioritas kebutuhannya yang terpenting. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya diorientasikan untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang dalam mencapai ridha Allah. Kegiatan ekonomi tidak saja melibatkan aspek materi, tapi juga kualitas keimanan seorang hamba kepada Allah Swt.

Konsep pembangunan yang melibatkan *maqashid as-yari'ah* dimaksudkan agar terbentuk pribadi-pribadi muslim yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Tentu saja sikap ini tidak saja didapatkan dari lubuk hati yang dalam. Tetapi, dilandasi juga dari kesadaran manusia untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba-Nya. Kewajiban mengaplikasikan tanggung jawab seorang hamba untuk melakukan kejujuran, kebenaran, kebajikan dan kasih sayang terhadap seluruh data kehidupan aktual. Islam mengajarkan tanggung jawab agar mampu mengendalikan diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab kepada Allah, kepada sesama dan lingkungannya (Ansorullah, 2007).

Oleh karena itu, dengan mempelajari CSR sebagai salah satu alternative disertai dengan berbagai teknis pelaksanaannya secara menyeluruh, maka seharusnya manusia Indonesia tidak perlu gagap menghadapi gelombang globalisasi. Mempelajari CSR secara utuh dan disandingkan dengan kebijakan nilai-nilai islam dapat menghasilkan sinergi nyata bagi manusia Indonesia untuk menjawab tantangan gelombang globalisasi dan pencapaian keseimbangan *triple*

bottom line di muka Bumi. Dan banyak pihak telah mengamini bahwa pencapaian keseimbangan *triple bottom line* hanya bisa terealisasi dengan komitmen kolaborasi kemitraan tiga pihak (*tri-sector partnership*), yaitu negara-korporasi-masyarakat sipil, secara sungguh-sungguh dan proporsional (Sampurna, 2007).

2.1.4.4 Regulasi Tanggung Jawab Sosial Di Indonesia

Semenjak keruntuhan rezim Orde Baru, masyarakat semakin berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan tuntutan mereka terhadap perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Masyarakat telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggungjawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya (Jalal, 2006).

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

Menilik sejarahnya, gerakan CSR modern yang berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Hingga dekade 1980-90 an, wacana CSR terus berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya semakin menggurita (Daniri, 2007).

Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro Brazil 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah ;

- (1) ketersediaan dana,
- (2) misi lingkungan,
- (3) tanggung jawab sosial,
- (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah),
- (5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep *social responsibility*, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu *economic* dan *environment sustainability*. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*). Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Daniri, 2009).

Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga *stakeholder* inti, yaitu perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan mendukung penuh (The Business Watch Indonesia,

2007).

Di Tanah Air, CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No.40 Tahun 2007 yang disahkan DPR. Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Ternyata terdapat inkonsistensi antara pasal 1 dengan pasal 74 serta penjelasan pasal 74 itu sendiri. Pada pasal 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat "... komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan serta", sedangkan pasal 74 ayat 1 "... wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Pada pasal 1 mengandung makna pelaksanaan CSR bersifat sukarela sebagai kesadaran masing-masing perusahaan atau tuntutan masyarakat. Sedangkan pasal 74 ayat 1 bermakna suatu kewajiban. Lebih jauh lagi kewajiban pada pasal 74 ayat 1 tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sanksinya pada pasal 74 ayat 3. Sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak diatur dalam UU PT tetapi digantungkan kepada peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

UU PT juga tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3 dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR "dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran". PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang hingga kini, belum dikeluarkan (Marlia, 2008).

Peraturan lain yang mengatur CSR adalah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR (Pasal 34), UU ini baru mampu menjangkau

investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional.

Peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Permen Negara BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2 persen yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan (Suharto,2008).

Bagi kelompok yang tidak setuju, UU CSR dipandang dapat mengganggu iklim investasi. Program CSR adalah biaya perusahaan. Di tengah negara yang masih diselimuti budaya KKN, CSR akan menjadi beban perusahaan tambahan disamping biaya-biaya siluman yang selama ini sudah memberatkan operasi bisnis. Sedangkan, kelompok yang setuju dengan UU CSR umumnya berargumen bahwa CSR memberi manfaat positif terhadap perusahaan, terutama dalam jangka panjang. Selain menegaskan *brand differentiation* perusahaan, CSR juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh *license to operate*, baik dari pemerintah maupun masyarakat. CSR juga bisa berfungsi sebagai strategi *risk management* perusahaan.

Meskipun telah membayar pajak kepada pemerintah, perusahaan tidak boleh lepas tangan terhadap permasalahan lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan. Di Indonesia yang masih menerapkan residual welfare state, manfaat pajak seringkali tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat kelas bawah, orang miskin dan komunitas adat terpencil. Oleh karena itu, bagi kalangan yang setuju UU CSR, CSR merupakan instrumen cash transfer dan suplemen sistem "negara kesejahteraan residual" yang cenderung gagal mensejahterakan masyarakat karena kebijakan dan program sosial negara bersifat fragmented dan tidak melembaga (Suharto, 2007).

Kritik yang muncul dari kalangan pebisnis bahwa CSR adalah konsep dimana perusahaan, sesuai kemampuannya, melakukan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan itu adalah diluar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan formal, seperti ketertiban usaha, pajak atas keuntungan dan standar lingkungan hidup. Mereka berpendapat, jika diatur, selain bertentangan dengan prinsip kerelaan, CSR juga akan memberi beban baru kepada dunia usaha.

Proses regulasi yang menyangkut kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel. Pertama, harus jelas apa yang diatur. Kemudian harus dipertimbangkan semua kenyataan di lapangan, termasuk orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum serta badan-badan yang melakukan penetapan dan penilaian standar. Juga harus diperhitungkan adalah kondisi politik, termasuk kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para aktor politik dalam meletakkan masalah kesejahteraan umum. Ini artinya harus melalui dialog bersama para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, dan organisasi pelaksana (Wibowo, 2008).

Kesukarelaan dalam pemahaman yang dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan yang berkomitmen CSR bukan berarti perusahaan bisa semaunya saja memilih untuk menjalankan atau tidak menjalankan tanggung jawabnya atau selektif terhadap tanggung jawab itu. Yang dimaksud dengan kesukarelaan adalah perusahaan juga menjalankan tanggung jawab yang tidak diatur oleh regulasi atau beyond regulation. Jadi, apa yang sudah diatur oleh pemerintah harus dipatuhi dahulu sepenuhnya, kemudian perusahaan menambahkan lagi hal-hal positif yang tidak diatur. Semakin banyak hal positif yang dilakukan perusahaan, padahal hal itu tidak diharuskan oleh pemerintah, maka kinerja CSR perusahaan itu dianggap semakin tinggi (Rochman, 2007).

Di sisi lain, penting dan harus diakui bahwa memang sebagian besar perusahaan tidak pernah atau belum mau melakukan hal positif di luar apa yang

sudah diatur regulasi. Bahkan, banyak penelitian yang membuktikan bahwa perusahaan memang punya kecenderungan untuk melanggar regulasi apabila konsekuensinya lebih ringan daripada keuntungan yang diperoleh bila melanggarnya. Dengan pemahaman yang demikian, maka banyak pihak yang mendesak agar seluruh tanggung jawab perusahaan diatur dengan ketat dalam regulasi pemerintah. Pihak-pihak ini juga mengusulkan penggantian istilah tanggung jawab (*responsibility*) menjadi tanggung gugat (*accountability*).

Jika pemerintah ingin mendorong hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan, maka Peraturan pemerintah tentang CSR haruslah mengakui bentuk-bentuk CSR kepada seluruh pemangku kepentingan, bukan sebagiannya saja. Para penyusun peraturan pemerintah dan mereka yang membantunya harus menyediakan daftar mana saja yang dimaksud sebagai pemangku kepentingan internal dan eksternal perusahaan, serta memberikan petunjuk bagaimana pemangku kepentingan itu dilayani sehingga masing-masing perusahaan kemudian benar-benar memiliki himpunan pemangku kepentingan yang relevan untuk dirinya. Hanya kepada pemangku kepentingan yang relevan sajalah perusahaan memiliki kewajiban menjalankan CSR. Dengan demikian, perusahaan akan terhindar dari melakukan penyempitan pemangku kepentingan memilih hanya sebagian dari pemangku kepentingan saja atau terbebani oleh beragam pihak yang mengklaim sebagai pemangku kepentingan. Batasan ini harus cukup jelas agar perusahaan tidak semaunya saja atau menanggung beban CSR terlalu besar (Jalal, 2007).

Saat ini ISO (*International Organization for Standardization*), tengah menggodok konsep standar CSR yang diperkirakan rampung pada akhir 2009. Standar itu dikenal dengan nama ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility*. Dengan standar ini, pada akhir 2009 hanya akan dikenal satu konsep CSR. Selama ini dikenal banyak konsep mengenai CSR yang digunakan oleh berbagai lembaga internasional dan para pakar.

Lewat ISO 26000 terlihat upaya untuk mengakomodir kepentingan semua

stakeholder. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi penting. Pemerintah harus punya pemahaman menyeluruh soal CSR agar bisa melindungi kepentingan yang lebih luas, yaitu pembangunan nasional. Pemerintah perlu jelas bersikap dalam hal ini. Misalnya, di satu sisi, mendorong agar perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek harus melaporkan pelaksanaan CSR kepada publik.

Cakupan dari ISO 26000 ini antara lain untuk membantu organisasi-organisasi menjalankan tanggung jawab sosialnya; memberikan '*practical guidances*' yang berhubungan dengan operasionalisasi tanggung jawab sosial; identifikasi dan pemilihan stakeholders; mempercepat laporan kredibilitas dan klaim mengenai tanggungjawab sosial; untuk menekankan kepada hasil performansi dan peningkatannya; untuk meningkatkan keyakinan dan kepuasan atas konsumen dan '*stakeholders*' lainnya; untuk menjadi konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya; tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial oleh suatu organisasi; dan, mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggung jawab sosial serta semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial (Jalal, 2011).

ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara:

- 1) Mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya;
- 2) Menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif
- 3) Memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang

menggodok ISO 26000 *Guidance Standard on Social responsibility* yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah *Social Responsibility* akan mencakup 7 isu pokok yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. Organizational Governance (governance organisasi)

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:

- a) Kepatuhan kepada hukum
- b) Menghormati instrumen/badan-badan internasional
- c) Menghormati stakeholders dan kepentingannya
- d) Akuntabilitas
- e) Transparansi
- f) Perilaku yang beretika
- g) Melakukan tindakan pencegahan
- h) Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

ISO 26000 sesuatu yang tidak bisa ditawar. Meskipun, dalam rilis yang diambil dari website resmi ISO, standarisasi mengenai Social Responsibility, memang dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak wajib, tetap saja ini akan menjadi trend yang akan naik daun di tahun 2009 dan harus dihadapi dengan sungguh-sungguh, jika ingin tetap eksis dalam dunia usaha di Indonesia. ISO 26000 ini bisa dijadikan sebagai rujukan atau pedoman dalam pembentukan pedoman prinsip pelaksanaan CSR di Indonesia (Daniri, 2008).

2.1.4.5 Pentingnya Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Saat ini banyak sekali perusahaan yang begitu berfokus kepada kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal Ini menunjukkan suatu kesadaran baru di dunia bisnis, bahwa bukan sekedar soal bertumbuh dari sisi bisnis, namun juga keberhasilan itu harus disertai dengan semakin sejahteranya masyarakat sekitar daerah bisnis. Ini jelas sangat menguntungkan baik secara bisnis perusahaan maupun secara sosial.

Secara bisnis, kesinambungan bisnis akan tercipta apabila lingkungan sekitar kondusif dan mendukung. Secara sosial, kegiatan CSR akan mendorong terciptanya kondisi sosial perusahaan yang harmonis, utamanya dengan lingkungan sekitar. Bukan saja akan mendorong membaiknya kinerja usaha, namun juga memberikan *multiplayer effect* bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, masyarakat di sekitar perusahaan akan merasakan manfaat positifnya bukan sebaliknya.

Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan (*external drivers*) dan dari dalam perusahaan (*internal drivers*). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberlakukan audit Proper (Program penilaian peningkatan kinerja perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (*stakeholders*), termasuk tingkat kepedulian/tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (*community development responsibility*) (KNLH, 2006).

Melalui pengungkapan sosial, perusahaan mengkomunikasikan kepada *stakeholders* mengenai aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukannya. Perusahaan mengungkapkan informasi yang lebih luas diluar batas-batas akuntansi konvensional. Informasi tersebut antara lain mengenai karyawan, produk, konsumen, lingkungan hidup dan kemasyarakatan. Pentingnya pengungkapan sosial perusahaan (*Corporate*

Social Disclosure) berkaitan dengan adanya kontrak atau perjanjian sosial (*social contract*). Kontrak antara perusahaan dengan masyarakat baik yang sifatnya eksplisit maupun implisit yang timbul karena interaksi perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Hal ini membawa konsekuensi perusahaan harus bertanggungjawab tidak hanya terhadap kesejahteraan pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan, membuat masyarakat dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan cara demikian, perusahaan akan memperoleh perhatian, kepercayaan, dan dukungan dari masyarakat sehingga perusahaan dapat tetap eksis (Utomo 2000 dalam Masnila, 2006).

Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham, perusahaan juga menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari masyarakat (konsumen) sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai harapan tertentu terhadap perusahaan. Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Daniri (2008) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut :

1) *Basic responsibility* (BR)

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahaan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.

2) *Organization responsibility* (OR)

Pada level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan "*Stakeholder*" seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya.

3) *Social responses (SR)*

Pada level ketiga, menunjukkan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.

Seringkali kepentingan perusahaan berseberangan dengan kepentingan masyarakat. Sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi keuntungan, yaitu pilihan-pilihan tersebut harus menguntungkan kedua belah pihak.

Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya.

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, dan prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip etika bisnis itu sendiri adalah:

- a) Prinsip otonomi; adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- b) Prinsip kejujuran.
- c) Prinsip keadilan.
- d) Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*).
- e) Prinsip integritas moral; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan/orang-orangnya maupun perusahaannya.

Saling ketergantungan antara sebuah perusahaan dengan masyarakat memiliki dua bentuk. Pertama, *inside-out linkages*, bahwa perusahaan memiliki dampak terhadap masyarakat melalui operasi bisnisnya secara normal. Dalam hal ini perusahaan perlu memerhatikan dampak dari semua aktivitas produksinya, aktivitas pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, penjualan, logistik, dan aktivitas lainnya. Kedua, *outside-in-linkages*, di mana kondisi sosial eksternal juga memengaruhi perusahaan, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini meliputi kuantitas dan kualitas input bisnis yang tersedia yaitu sumber daya manusia, infrastruktur transportasi, peraturan dan insentif yang mengatur kompetisi, besar dan kompleksitas permintaan daerah setempat serta ketersediaan industri pendukung di daerah setempat (Marlia, 2008).

Pentingnya CSR dipengaruhi oleh fenomena DEAF (yang dalam Bahasa Inggris berarti tuli) di dunia industri. DEAF adalah akronim dari Dehumanisasi, Emansipasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi (Suharto, 2007):

- 1) **Dehumanisasi industri.** Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. “Merger mania” dan perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang PHK dan pengangguran. Ekspansi dan eksploitasi industri juga telah melahirkan ketimpangan sosial, polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.
- 2) **Emansipasi hak-hak publik.** Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut kepedulian perusahaan bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.
- 3) **Aquariumisasi dunia industri.** Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis dan filantropis tidak

akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini di tutup.

- 4) **Feminisasi dunia kerja.** Semakin banyaknya wanita yang bekerja semakin menuntut penyesuaian perusahaan bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan pula terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, akibat berkurangnya atau hilangnya kehadiran ibu-ibu di rumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pendirian fasilitas pendidikan, kesehatan dan perawatan anak (*child care*) atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja adalah beberapa bentuk respon terhadap isu ini.

Tekanan yang kuat dari masyarakat terutama di tengah masyarakat yang kritis mengharuskan perusahaan menata kembali konsep bisnis untuk tidak sekedar berorientasi profit belaka tetapi juga harus memiliki tanggung jawab sosial. Konsep dan praktek *Corporate Social Responsibility* sudah menunjukkan suatu keharusan. Para pemilik modal tidak bisa lagi menganggap CSR sebagai suatu pemborosan. Tetapi tuntutan untuk melaksanakan program CSR makin tinggi terutama ketika suatu perusahaan hendak *go public* atau sekedar menjalin kerjasama dengan perusahaan internasional dari Negara maju (Marlia, 2008).

2.1.4.6 Manfaat Tanggung Jawab Sosial

Corporate social responsibility dibuat untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*).

Melakukan program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada perusahaan itu sendiri maupun para

stakeholder yang terkait. Contoh nyata dari program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan semangat keberlanjutan antara lain, yaitu: pengembangan bioenergi, melalui kegiatan penciptaan Desa Mandiri Energi yang merupakan cikal bakal dari pembentukan eco-village di masa mendatang bagi Indonesia (Tshahindra, 2009).

Dari sisi perusahaan terdapat 6 (enam) manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR antar lain (Susanto, 2007) :

- 1) ***Risk management*** . Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan CSR secara konsisten akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang merasakan manfaat dari aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mengangkat citra perusahaan, yang dalam rentang waktu yang panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan.
- 2) ***Brand differentiation***. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan produsen consumer goods yang beberapa waktu yang lalu dilanda isu adanya kandungan bahan berbahaya dalam produknya. Namun karena perusahaan tersebut dianggap konsisten dalam menjalankan CSR-nya maka masyarakat menyikapinya dengan tenang sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya.
- 3) ***Human resources***. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan.
- 4) ***License to operate***. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para

stakeholdersnya. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih.

- 5) ***Meningkatnya penjualan.*** Konsumen akan lebih menyukai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang secara konsisten menjalankan CSRnya sehingga memiliki reputasi yang baik.
- 6) ***Insentif-insentif lainnya,*** seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal ini dikarenakan telah ikut berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah.

CSR akan menjadi strategi bisnis yang baik dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (*loyalitas*) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win win situation*). Hal ini berarti konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung (Suparno 2010).

CSR dalam jangka pendek memang tidak memberikan *value* yang memadai bagi pemegang saham, karena biaya CSR, malahan mengurangi keuntungan yang bisa dicapai perusahaan. Namun demikian, dalam jangka panjang, perusahaan yang memiliki komitmen kuat di CSR, ternyata kinerjanya melampaui perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki komitmen terhadap CSR. Dengan kata lain, CSR dapat menciptakan *value* bagi perusahaan, terutama dalam jangka panjang.

Manfaat CSR bagi pemerintah adalah pertama, Pemerintah bisa bertepuk dada sukses memaksa perusahaan melaksanakan kegiatan CSR bagi rakyat. Sehingga

pemerintah merasa sangat terbantu perusahaan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Kedua, dimungkinkan Pemerintah akan kecipratan banyak dana karena banyak kegiatan CSR yang dilaksanakan bersama-sama dengan program pemerintah. Ketiga, pelaksanaan CSR akan membantu mengatasi kemiskinan yang selama ini menjadi masalah berat bagi pemerintah. Dan keempat, Pemerintah akan terbantu dalam sektor perekonomian karena akan banyak perusahaan-perusahaan yang go public. Hal ini dikarenakan investor asing akan lebih senang berinvestasi di perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik (Sudewo, 2009).

Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. (Wijaya, 2009).

Aktor	Peran dalam pemberdayaan	Bentuk output peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan penetapan policy, implementasi monitoring dan evaluasi mediasi	Kebijakan: politik, umum khusus/departemental/sektoral penganggaran, juknis dan juklak, penetapan indikator keberhasilan peraturan hukum, penyelesaian sengketa.	Dana, jaminan, alat, teknologi, network, sistem manajemen informasi, edukasi

Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Konsultasi & rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah/policy action implementasi, donatur, private investment pemeliharaan	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil.
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. Policy action, dana swadaya menjadi obyek, partisipan, pelaku utama/subyek menghidupkan fungsi social control	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih

Tabel 2.2 Sinergi hubungan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat
 Sumber : Tim Universitas Katolik Parahyangan (2008)

2.1.4.7 Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Upaya penerapan CSR sendiri bukannya tanpa hambatan. Dari kalangan ekonom sendiri juga muncul reaksi sinis misalnya, mengkritik konsep CSR, dengan argumen bahwa tujuan utama perusahaan pada hakikatnya adalah memaksimalkan keuntungan (*returns*) bagi pemilik saham dengan mengorbankan hal-hal lain.

Ada juga kalangan yang beranggapan, satu-satunya alasan mengapa perusahaan mau melakukan proyek-proyek yang bersifat sosial adalah karena memang ada keuntungan komersial di baliknya. Yaitu, mengangkat reputasi perusahaan di mata publik ataupun pemerintah. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus menunjukkan dengan bukti nyata bahwa komitmen mereka untuk melaksanakan CSR bukanlah main-main (Susanto, 2007).

Tuntutan tanggung jawab sosial dalam bisnis sangat luas. Tetapi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) mempunyai keterbatasan. Secara umum keterbatasan-keterbatasan dalam pelaksanaan CSR bagi perusahaan antara lain (Susiloadi, 2008) :

- 1) **Biaya.** Setiap aksi sosial pasti akan menimbulkan biaya. Contohnya kontribusi perusahaan yang bersifat amal dengan membangun pusat penampungan anak karyawan. Dengan dana yang tersedia yang sudah diserap untuk tempat penampungan anak, akan membatasi aksi sosial lainnya.
- 2) **Efisiensi.** Biaya untuk melaksanakan CSR dapat mengurangi efisiensi perusahaan dan berdampak pada penurunan daya saing di pasar. Contohnya, perusahaan mendapat tekanan dari masyarakat lokal untuk tetap mempertahankan mesin-mesin yang bersifat padat karya yang tentu tidak efisien. Sebaliknya jika mesin-mesin tersebut diganti dengan mesin padat modal akan lebih efisien. Tetapi akan berdampak menurunnya penyerapan tenaga kerja sehingga menyebabkan pengangguran.
- 3) **Relevansi.** Kewajiban pelaksanaan CSR menimbulkan pertanyaan di benak pelaku bisnis tentang apakah masalah sosial dan lingkungan merupakan tanggung jawab perusahaan dan apakah mempunyai dampak serius terhadap operasional perusahaan. Jika memang jawabannya iya, maka perusahaan dengan senang hati melaksanakan kegiatan CSR. Tetapi jika tidak, maka perusahaan akan berfikir dua kali untuk mengeluarkan biaya bagi kegiatan CSR hal ini dianggap sebagai beban atau pemborosan bagi perusahaan.
- 4) **Cakupan atau kompleksitas.** Banyak masalah sosial dan lingkungan yang sangat kompleks dan membutuhkan penyelesaian yang baik oleh suatu perusahaan secara bersama-sama. Misalnya, masalah penipisan lapisan ozon dan pencegahan HIV/AIDS. Untuk merespon masalah seperti ini tidak dapat diselesaikan oleh satu perusahaan tanpa adanya kerja sama antar beberapa perusahaan dan pemerintah serta berbagai bangsa.

- 5) **Regulasi.** Perusahaan memerlukan bimbingan atau petunjuk berupa peraturan hokum dan kebijaksanaan pemerintah. Sebab tanpa petunjuk, perusahaan tidak mengerti secara pasti apa yang menjadi tujuan sosial.

2.1.5 Tipe Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam prakteknya terdiri tiga tingkatan tipe pengungkapan yaitu :

1. kualitatif naratif, Bentuk narasi atau pernyataan tanpa dilengkapi angka-angka pendukung disebut dengan pengungkapan
2. kuantitatif non-moneter, dinyatakan dalam bentuk angka-angka namun tidak dalam satuan uang/moneter.
3. kuantitatif moneter, dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dalam satuan uang/moneter.

Utomo (2000) dalam Masnila (2006) menyatakan bahwa tipe pengungkapan yang paling sering digunakan yaitu kualitatif naratif. Tetapi praktek tanggung jawab sosial yang dilakukan masih tergolong sedikit. Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan sedikitnya pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan adalah :

- 1) Perusahaan telah melakukan pengungkapan pada periode sebelumnya, sehingga merasa tidak perlu mengungkapkannya lagi.
- 2) Perusahaan tidak merasa perlu melakukan pengungkapan item-item tertentu, karena menganggapnya sebagai hal biasa. Misalnya perusahaan tidak mengungkapkan donasi ke lembaga keagamaan atau sponsorship kegiatan kampus.
- 3) Laporan tahunan didesain untuk kepentingan shareholders, sehingga informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders lain tidak diungkap dalam laporan tahunan.

2.1.6 Tema Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Hackston dan Milne (1996) dalam Sembiring (2005) mengemukakan tujuh kategori dalam pengungkapan tema tanggung jawab sosial. Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan. Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka penyesuaian kemudian dilakukan. Dua belas item dihapuskan karena kurang sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga secara total tersisa 78 item pengungkapan. Tujuh puluh delapan item tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan masing-masing sektor industri sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap sektor berbeda-beda.

1) **Kemasyarakatan,**

Tema mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

2) **Energi**

Tema yang mencakup pemanfaatan penggunaan energi dalam aktivitas operasi perusahaan dan bagaimana perusahaan memanfaatkan barang bekas hasil produksinya, serta apakah perusahaan melakukan riset tentang pemanfaatan penggunaan energi.

3) **Ketenagakerjaan,**

Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya serta bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya.

4) **Lain-lain tenaga kerja**

Tema yang meliputi pemanfaatan tenaga kerja minoritas serta pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan untuk karyawan.

5) **Produk dan Konsumen,**

Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa.

6) Lingkungan Hidup.

Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan kegiatan operasinya, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan.

7) Umum

Tema yang mencakup kegiatan perusahaan yang tidak dibahas pada tema-tema diatas dan kebijakan yang diambil perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial.

2.1.7 Lokasi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Lokasi pengungkapan berarti merujuk pada tempat dimana pengungkapan tersebut dilakukan. Menurut Utomo (2000) dan Masnila (2006) ada beberapa bagian atau lokasi pengungkapan dalam laporan tahunan yaitu :

- 1) *overview*,
- 2) surat dari dewan komisaris,
- 3) surat dari dewan direksi,
- 4) catatan atas laporan keuangan,
- 5) lokasi yang lainnya

2.1.8 Teori dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan tanggung jawab sosial khususnya di Indonesia menggunakan media yang berbeda variasinya, cara memilih media pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dasarkan pada kelaziman dan untuk kepentingan tertentu. Pengungkapan biaya sosial yang terkait dengan pengelolaan lingkungan lebih banyak disajikan dalam prospektus oleh perusahaan, karena laporan prospektus bisa digunakan sebagai ajang propaganda pada saat perusahaan menjual saham perdana di bursa efek. Sedangkan pengungkapan tanggung jawab sosial mengenai kesejahteraan pegawai, masyarakat, dan pemantauan bidang produksi pada umumnya diungkapkan di dalam media laporan tahunan dan catatan atas laporan keuangan. Penyebab lain

perbedaan pengungkapan tanggung jawab sosial karena belum adanya aturan yang jelas mengenai tata cara penyajian, sehingga masing-masing perusahaan mempunyai cara dan kebijakan sendiri dalam melakukan pengungkapannya.

Gray et. Al (1995) dalam Sudarno (2004) merangkum berbagai teori yang dipergunakan oleh para peneliti untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan sosial dalam tiga kelompok utama :

1) Studi penggunaan keputusan (*Decision Usefulness Studies*)

Perusahaan mengungkapkan informasi aktivitas sosial dan lingkungan karena kelompok pengguna tradisional, terutama pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh manfaat dalam pengambilan keputusan investasi.

2) Studi teori ekonomi (*Economic Theory Studies*)

Studi teori ekonomi ini mengacu pada teori agensi dan teori akuntansi positif, yaitu untuk menghindari tekanan dari pengguna laporan tahunan selain pengguna tradisional dalam menegakkan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Maka sebagai agen, manajemen akan berupaya mengoperasikan perusahaan sesuai dengan keinginan *stakeholders*.

3) Studi teori sosial dan politik (*social and Political Theory Studies*)

Teori *stakeholders*, teori *legitimasi*, dan teori ekonomi politik digunakan dalam studi teori sosial dan politik. Ketiga teori di atas tidak terpisahkan dan tidak bersaing. Teori *stakeholders* dan teori *legitimasi* dilihat dalam perspektif saling melengkapi sebagai kerangka asumsi ekonomi politik. Perusahaan membuat pengungkapan aktivitas sosial dan informasi lingkungan bukan hanya untuk kepentingan ekonominya sendiri tetapi lebih karena penekanan supaya menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat umum, serta kelompok aktivitas sosial dan lingkungan hidup lainnya. Pengungkapan ini dipandang sebagai media manajemen untuk

bernegosiasi atau memanipulasi *stakeholders*, karena tanpa dukungan *stakeholders*, perusahaan tidak dapat berjalan lancar.

2.2 Penelitian terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu yang telah dilakukan tentang pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan dengan memperhatikan perkembangan *Corporate Social Responsibility*, aktifitas *Corporate Social Responsibility*, manfaat aktivitas *Corporate Social Responsibility*, pengukuran biaya aktifitas *Corporate Social Responsibility*, dan penyajian aktifitas *Corporate Social Responsibility* dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan.

Sembiring (2005) meneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sembiring memilih sampel secara acak 78 perusahaan dari 323 perusahaan yang mendarat di Bursa Efek Jakarta tahun 2002 sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai variabel dependen, sedangkan sebagai variabel independen Sembiring menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, *profile*, ukuran dewan komisaris dan *leverage*. Hasil penelitian ini, variabel independen mempengaruhi secara simultan sebesar 37,5% variabel dependen. Variabel ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan *profile* menunjukkan pengaruh signifikan, tetapi untuk variabel profitabilitas dan *leverage* mempunyai pengaruh tidak signifikan.

Penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial juga dilakukan oleh Utomo (2000). Tujuan penelitian ini untuk melihat pengungkapan sosial pada laporan tahunan di perusahaan *high profile* dan perusahaan *low profile* di Indonesia. Sampel yang digunakan, 81 perusahaan yang telah *go-public* di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Bagian pertama penelitian ini memperlihatkan pola meliputi tema dan item, lokasi dan tipe pengungkapan sosial perusahaan tersebut. Sedangkan pada bagian kedua melakukan pengujian untuk membuktikan hipotesis perbedaan pengungkapan antara perusahaan *high profile* dan perusahaan *low profile*. Hasilnya

menyatakan bahwa *profile* perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial.

Pengungkapan tanggung jawab sosial yang diteliti menggunakan tema terhadap reaksi investor juga diteliti oleh Nurdin (2006). Penelitian ini menggunakan pengungkapan tema sosial dan lingkungan sebagai variabel independen dan reaksi investor ssebagai variabel independen. Penelitian ini membuktikan bahwa pengungkapan tema-tema sosial dan lingkungan (yang terdiri dari tema keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan dan sumber daya fisik, serta produk atau jasa) dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh terhadap reaksi investor (yang terdiri dari perubahan harga saham dan volume perdagangan saham) bagi perusahaan yang masuk dalam kategori *high profile*. Ini mengindikasikan bahwa investor di Indonesia sudah mulai menggunakan informasi sosial dan lingkungan dalam melakukan keputusan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sedang mengikuti trend global, dimana tema-tema sosial dan lingkungan sudah menjadi salah satu sumber pengambilan keputusan investasi.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Masnila (2006) yang meneliti tinjauan atas praktek pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dipandang dari sudut akuntansi. Penulisan ini meneliti penyajian aktifitas *Corporate Social Responsibility* dalam Laporan Keuangan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui pengungkapan tema, lokasi, dan tipe pengungkapannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan dan internet maupun media - media lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku – buku tetapi juga dapat berupa bahan dokumentasi, majalah, koran, dan lain-lain berupa bahan tertulis. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diselidiki (Nawawi, 1995).

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur adalah sebuah kajian pustaka yang mana penulis berusaha memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini. Sedangkan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan dan mengambil data, catatan-catatan dan dokumentasi perusahaan yang relevan dengan keperluan penelitian dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian (Nawawi, 1995).

Jenis data adalah data sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi melalui media perantara (Indrianto dan Supomo, 2002). Data dalam penelitian ini bersifat *pooling* yaitu gabungan antara *time series* dan *cross sectional* yaitu studi mengenai beberapa subyek pada data rentetan waktu berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007, 2008 dan 2009.

Data yang diperoleh dapat dari berbagai sumber antara lain Indonesia Stock Exchange berdasarkan klasifikasi industri Manufaktur, Pojok BEJ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember, Laboratorium pasar modal Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan www.idx.co.id.

Sedangkan untuk informasi – informasi lain yang berhubungan dapat diperoleh melalui :

1) Buku-buku

Buku-buku yang diperlukan dalam penelitian dapat berupa buku teks, buku tahunan, buku pegangan, dan dapat juga berupa diktat atau draf buku.

2) Jurnal

Jurnal adalah majalah ilmiah yang berisi artikel ilmiah, biasanya diterbitkan oleh organisasi profesi tertentu atau kelembagaan penelitian

3) Laporan penelitian

Laporan Penelitian merupakan buku yang berisi hasil penelitian secara utuh.

4) Sumber lain

Sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa artikel lepas yang tersedia di perpustakaan atau langsung dari pengarangnya atau juga dapat diperoleh dari internet.

3.3 Metode Pengumpulan Informasi

Metode pengumpulan informasi pada penelitian ini menggunakan riset kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Nawawi, 1995).

Penulis menggunakan metode ini dalam penelitian karena beberapa kelebihan, antara lain :

1. Pilihan alternatif, untuk subyek penelitian tertentu yang sukar atau tidak mungkin di jangkau maka studi dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan penelitian (pengumpulan data).
2. Tidak reaktif, karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan orang maka data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpul data.
3. Untuk penelitian yang menggunakan data yang menjangkau jauh ke masa lalu.
4. Besar sampel, dengan dokumen-dokumen yang tersedia, memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar dengan biaya yang relatif kecil.

Meskipun memiliki beberapa kelebihan, penulis juga menyadari bahwa metode yang dipergunakan tersebut juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

1. Bias, biasanya data yang disajikan dalam dokumen bisa berlebihan atau tidak ada (disembunyikan).
2. Tersedia secara selektif, tidak semua dokumen dipelihara untuk dibaca ulang oleh orang lain
3. Tidak komplit, data yang terdapat dalam dokumen tidak lengkap.
4. Format tidak baku, format yang ada dalam dokumen biasanya berbeda dengan format yang terdapat pada penelitian, disebabkan tujuan penulisan dokumen berbeda dengan tujuan penelitian.

3.4 Bentuk Analisis Informasi dan Analisis Informasi

3.4.1 Bentuk Analisis informasi

Bentuk analisis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis informasi kualitatif. Analisis informasi kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan ekonometrik atau model tertentu lainnya. Analisis informasi yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan informasinya, seperti pada pengecekan informasi dan tabulasi, dalam hal ini hanya

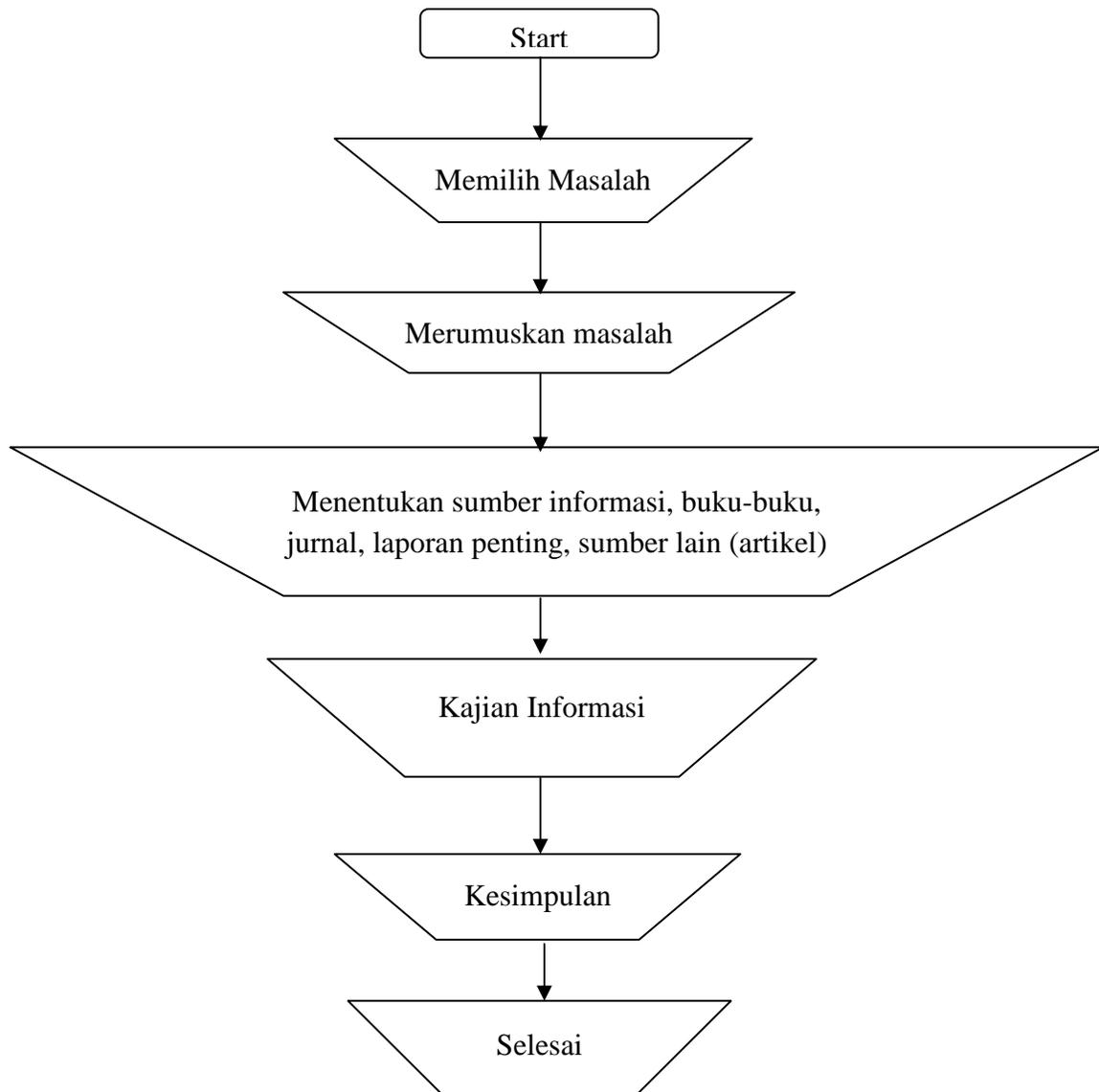
sekedar membaca artikel, jurnal, buku, majalah, dan sumber lain kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

3.4.2 Analisis Informasi

Analisis informasi yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis informasi teknik deskriptif kualitatif. Ada beberapa model diantaranya model penelitian yang bersifat bibliografis/kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan biasanya lebih menekankan kekuatan analisis informasinya pada sumber-sumber dokumentasi dan teoritis, atau hanya mengandalkan teori-teori saja, yang selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan secara luas, dalam dan tajam.

3.5 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang telah disusun penulis adalah sebagai berikut :



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Di Indonesia

Setiap perusahaan memiliki bentuk CSR yang berbeda – beda dan tergantung dari kompetensi perusahaan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Sebaiknya sebelum melaksanakan kegiatan CSR, diharapkan perusahaan melakukan survey terlebih dahulu untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga CSR yang nantinya dilaksanakan tepat guna dan tepat sasaran.

CSR akan lebih mudah dan murah jika dipahami oleh seluruh individu didalam perusahaan dalam konteks pencapaian visi dan misi perusahaan. Pada internal perusahaan CSR harus dipandang seperti keselamatan kerja. Jika keselamatan kerja diterapkan hanya melalui pengawasan dan penyediaan alat keselamatan maka tentunya akan lebih mahal. Berbagai unit kerja yang terkait dengan pemangku kepentingan berpotensi mendapatkan manfaat untuk performanya dari kegiatan berCSR dan tentunya perlu berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Maka berperilaku yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat adalah kewajiban semua individu dalam perusahaan.

Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Dan setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan isu berkaitan dengan CSR serta beberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan CSR.

Implementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profil risiko, serta kondisi operasional masing- masing perusahaan. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun tidak terdapat standar atau praktik-praktik tertentu yang

dianggap terbaik dalam pelaksanaan CSR, namun kerangka kerja (*framework*) yang luas dalam pengimplemantasian CSR masih dapat dirumuskan, yang didasarkan pada pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang seperti manajemen lingkungan (Susanto, 2007).

Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum di Indonesia adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin. CSR pada tataran ini hanya sekadar *to look good*, berbuat baik agar terlihat baik. Kemudian semakin banyak perusahaan yang kurang menyukai pendekatan karitatif semacam itu, karena tidak mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal. Pendekatan *community development* kemudian semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep *empowerment* dan *sustainable development*.

Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan *needs assessment*. Mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, program pencegahan penyakit melalui pendidikan kesehatan masyarakat, membangun fasilitas MCK untuk masyarakat sekitar, memberikan kesempatan bekerja secara produktif bagi penyandang cacat, pelatihan untuk penyandang cacat, pemberian bantuan/pinjaman modal bagi UKM, *social forestry*, pemberian beasiswa, bantuan sosial, penyuluhan dan pencegahan HIV/AIDS, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat, pengobatan gratis bagi masyarakat, dan sebagainya. CSR pada tataran ini tidak sekadar *to look good*, melainkan pula *to make good*, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Marlia, 2008).

Skala dan sifat keuntungan dari CSR untuk suatu organisasi dapat berbeda-beda tergantung dari sifat perusahaan tersebut. Banyak pihak berpendapat bahwa amat sulit untuk mengukur kinerja CSR. Sesungguhnya cukup banyak literatur yang memuat tentang cara mengukurnya. Literatur tersebut misalnya metode "Empat belas poin balance scorecard oleh Deming. Literatur lain misalnya Orlizty, Schmidt, dan

Rynes yang menemukan suatu korelasi positif walaupun lemah antara kinerja sosial dan lingkungan hidup dengan kinerja keuangan perusahaan. Kebanyakan penelitian yang mengaitkan antara kinerja CSR (*corporate social performance*) dengan kinerja finansial perusahaan (*corporate financial performance*) memang menunjukkan kecenderungan positif, namun kesepakatan mengenai bagaimana CSR diukur belumlah tercapai (Daniri, 2008).

Nama perusahaan	Bentuk CSR	Pelaksanaan
PT. Indocement Tunggal Prakasa, Tbk	Kelestarian lingkungan hidup	Kegiatan Program Clean Development Mechanism (CDM), Program ini merupakan program kerjasama antara Negara maju dan Negara berkembang dalam penandatanganan Protokol Kyoto untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. PT. Indocement Tunggal Prakasa, Tbk. menerapkan Program CDM dengan Proyek Pemanfaatan Bahan Bakar dan Material Alternatif (BBMA).
Sinar Mas Group	Pemberdayaan masyarakat	Melalui Eka Tjipta Fondation, organisasi nirlaba yang didirikan untuk Meningkatkan kualitas kehidupan. Kegiatan pendidikan, seni budaya, olah raga, kesejahteraan sosial, keagamaan dan kesehatan serta kegiatan sosial kemitraan usaha kecil menengah serta pertanian terpadu
	Pelestarian lingkungan	melalui kegiatan sosial pemberdayaan lingkungan hidup dan konservasi
PT Sampoerna Agro	Pemberdayaan masyarakat	Komitmen CSR perseroan ditujukan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan

		masyarakat dan fasilitas umum. Segi pendidikan ditunjukkan melalui peningkatan kualitas guru di daerah dan sebagai sponsor jamboree pelajar. Terdapat pula pengobatan gratis dan program kemitraan bagi petani kelapa sawit.
	Pelestarian lingkungan	Menjadi anggota RSPO, forum nternasional pengembangan minyak kelapa sawit secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perseroan memberkan penekanan pada tiga hal penting yaitu input, produksi dan output. Contohnya, dengan pembukaan lahan tanpa proses pembakaran dan penerapan biological control.
Astra Group	Pemberdayaan masyarakat	Melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra melakukan program pemberdayaan UKM melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas produsen. Termasuk di dalam program ini adalah pelatihan manajemen, studi banding, magang, dan bantuan teknis. Yayasan ini juga mengembangkan beberapa program seperti: pemberian beasiswa, dana riset, mensponsori kegiatan ilmiah universitas, penerjemahan dan donasi buku-buku teknik, program magang dan pelatihan kewirausahaan di bidang otomotif.

PT Energi Mega Persada	Pelestarian lingkungan	Melaksanakan ujicoba penanaman mangrove pada pantai dengan tingkat kerusakan sedang dengan jalan membangun konstruksi sederhana penahan ombak. Perseroan juga melaksanakan penghijauan pada daerah bekas pemboran serta area-area sekitar tapak sungai.
	Pemberdayaan masyarakat	Melalui program peningkatan keahlian kepala desa, pengobatan gratis, dan pembentukan kluster industry serta pembentukan lembaga pembiayaan mikro.
PT. Kalbe Farma Tbk	Pemberdayaan masyarakat	Melalui akademi kalbe, yang melaksanakan klinik berbagi dan pengobatan gratis. Sedangkan untuk program sarana kalbe berbagi, yaitu melalui pembuatan sanitasi, dan pembangunan sarana mandi cuci kakus serta penampungan air utama

Tabel 4.1 Contoh pelaksanaan CSR di Indonesia beserta manfaatnya
Sumber : Data Sekunder (data diolah, berbagai tahun)

4.2 Gambaran Obyek Penelitian

Pemikiran yang melandasi Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas.

Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi

masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.

Berikut tabel 4.2 yang memuat daftar jumlah perusahaan dan daftar nama (Lihat lampiran A) perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2007, 2008, dan 2009 yang melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mempublikasikannya. Yaitu :

	2007	2008	2009
Total perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	390	394	396
Total perusahaan yang datanya tidak lengkap dipublikasikan	103	111	118
Total perusahaan yang belum mengungkapkan tanggung jawab sosial	19	15	10
Total perusahaan yang datanya diperoleh lengkap	268	268	268
Total perusahaan	804		

Tabel 4.2 Perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial
Sumber : Data Sekunder (data diolah)

4.3 Tema Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan tanggung jawab sosial dikelompokkan berdasarkan tujuh kategori yang diadopsi dari penelitian Sembiring (2005) sesuai dengan peraturan Bapepam NO. VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item untuk diaplikasikan di Indonesia. Pada tabel disajikan jumlah perusahaan yang mengungkapkan tema tanggung jawab perusahaan menurut klasifikasi industri.

Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Mengungkapkan							
		KE	KL	PE	KK	PK	TP	S	U
Agriculture	30	30	30	29	30	30	30	30	30
Mining	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Basic Industry and Chemical	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Miscellaneous industry	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Consumer goods industry	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Property, Real Estate, and Building Construction	84	84	84	84	84	84	84	84	83
Infrastructure, Utilities, and Transportation	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Finance	50	50	50	49	50	50	50	50	49
Trade, Service, and Investment	168	168	168	166	168	168	168	168	165

Tabel 4.3 Jumlah perusahaan yang mengungkapkan CSR

Sumber : Data Sekunder (data diolah, berbagai tahun)

Keterangan :

KE : Kinerja Ekonomi

KL : Kinerja Lingkungan

PE : Penghematan Energi

KK : Keselematan Kerja

PK : Praktik Kerja

TP : Tanggung jawab Produk

S : Sosial

U : Umum

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa seluruh perusahaan telah mengungkapkan kinerja ekonominya dengan baik. Sedangkan hampir seluruh perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial. Pengungkapan kinerja ekonomi ini lebih banyak berkaitan dengan tanggung jawab perusahaannya kepada karyawan dalam bentuk pemberian uang pesangon, gaji, pensiunan atau bonus. Pengungkapan ini dilakukan karena Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep-150/Men/2000 tentang penyelesaian pemutusan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta ganti kerugian di perusahaan.

Jika dilihat di tabel 4.3, pengungkapan lingkungan, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta tanggung jawab produk juga telah dilakukan oleh semua

perusahaan sampel meski bobotnya berbeda-beda (lihat lampiran C). Perusahaan melakukan pengungkapan meski dengan keadaan terpaksa, karena adanya tuntutan *stakeholder* perusahaan serta adanya keinginan perusahaan untuk mempertahankan citranya demi persaingan dengan perusahaan lain.

Berdasarkan hasil penelitian (lihat lampiran C) kelompok perusahaan agriculture dan jenis industri mining memilih pengungkapan item terbanyak pada tema lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta produk. Untuk agriculture, PT SMART Tbk dan PT Sampoerna Agro Tbk merupakan perusahaan dengan item pengungkapan terbanyak yaitu sebesar masing-masing 68 item dan 67 item. Sedangkan untuk kelompok mining yaitu PT Energi Megah Persada sebanyak 69 item dan PT Tambang BatuBara Bukit Asam Tbk sebanyak 68 item pengungkapan.

Kelompok perusahaan basic industry dan chemical, dan kelompok good consumer industry serta kelompok perusahaan trade service dan investment memilih memperbanyak item pengungkapan pada tema produk, keselamatan dan kesehatan kerja serta praktik kerja. Hal ini disebabkan karena kelompok perusahaan-perusahaan diatas adalah perusahaan yang padat karya dan sensitive terhadap produknya sehingga tuntutan dari karyawan dan konsumen juga semakin tinggi.

Bagi kelompok perusahaan finance memilih memperbanyak item pada tema praktik kerja, produk dan sosial. Jenis industry ini sangat dekat dengan konsumen sehingga kepuasan pelanggan terhadap pelayanan, keamanan produk dan lingkungan sekitar sangat diperhatikan. Sedangkan untuk kelompok industry miscellaneous industry memilih item-item pada tema keselamatan dan kesehatan kerja, sosial dan produk. PT Astra internasional sebanyak 70 item dan PT Astra Otoparts sebanyak 64 item merupakan kelompok perusahaan miscellaneous yang paling banyak mengungkapkan tema tanggung jawab sosial.

Perusahaan infrastructure memilih tema keselamatan dan kesehatan kerja, praktik kerja dan sosial. Untuk perusahaan yang paling banyak mengungkapkan item, adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebanyak 67 item dan PT Telekomunikasi Indonesia sebanyak 66 item. Sedangkan jenis industry property memilih tema

lingkungan, produk dan praktik kerja. Hal ini dikarenakan banyak tuntutan dari semua pihak *stakeholders* untuk membangun lahan dengan prinsip memperhatikan lingkungan atau hunian hijau. PT Bakrieland Development dan PT Wijaya Karya adalah perusahaan property dengan pengungkapan item terbanyak.

Perusahaan telah belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi pada perusahaan-perusahaan yang telah meremehkan adanya CSR. Sehingga mereka harus menanggung kerugian yang lebih besar. Contohnya Kasus terbaru terjadi di Papua yang melibatkan PT Freeport yang terkenal dengan potensi sumber daya alamnya tersebut. Di sekitar areal pertambangan yang mengalirkan jutaan Dollar perhari, kehidupan masyarakat masih hidup miskin dan nyaris tak tersentuh perhatian perusahaan. Akibatnya, perusahaan mengalami banyak tuntutan baik dari LSM dan Pemerintah untuk berperilaku lebih etis dan memberikan uang penggantian kepada masyarakat sekitar (Susiloadi, 2008).

Hal ini sesuai dengan teori *stakeholder* yang berpendapat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi sesuai dengan kepentingannya sendiri namun memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder* tanpa terkecuali. Terdapat sejumlah *stakeholder* yang ada di dalam dan luar perusahaan, oleh karena itu dengan adanya CSR merupakan cara untuk mengelola hubungan organisasi dengan kelompok *stakeholder* yang berbeda. Karena tujuan utama dari perusahaan adalah menyeimbangkan konflik antara *stakeholder* (Chariri, 2007).

Pengungkapan tanggung jawab sosial yang diteliti menggunakan tema terhadap reaksi investor juga diteliti oleh Nurdin (2006). Penelitian ini menggunakan pengungkapan tema sosial dan lingkungan sebagai variabel independen dan reaksi investor sebagai variabel independen. Penelitian ini membuktikan bahwa pengungkapan tema-tema sosial dan lingkungan (yang terdiri dari tema keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan dan sumber daya fisik, serta produk atau jasa) dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh terhadap reaksi investor (yang terdiri dari perubahan harga saham dan volume perdagangan saham) bagi perusahaan yang masuk dalam kategori *high profile*. Ini mengindikasikan bahwa

investor di Indonesia sudah mulai menggunakan informasi sosial dan lingkungan dalam melakukan keputusan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sedang mengarah/mengikuti trend global, dimana tema-tema sosial dan lingkungan sudah menjadi salah satu sumber pengambilan keputusan investasi.

Pengungkapan tema-tema sosial dan lingkungan oleh perusahaan juga didukung oleh teori legitimasi. Teori ini berpendapat bahwa organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori ini menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktifitas dan kinerja mereka dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan (Andayani, 2009)

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang paling sering dilakukan adalah dalam bentuk kemitraan dan sumbangan secara langsung. Komitmen tersebut didukung dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara. Melalui kebijakan ini BUMN diwajibkan untuk turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dengan cara menyisihkan sebagian laba dari perusahaan. Kebijakan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara no. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang sebelumnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK016/1994 juga tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara.

Primasari dalam Mulyanita (2009) yang meneliti tentang Pengungkapan tanggung jawab sosial dan faktor – faktor yang mempengaruhi pada perusahaan di

Indonesia (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Hasilnya menunjukkan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia masih sangat rendah, dimana tidak satu perusahaan pun yang mengungkapkan seluruh item pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengungkapan yang paling banyak dilakukan adalah pada kategori lain-lain tenaga kerja dan ketelibatan masyarakat. Banyaknya pengungkapan sehubungan dengan ketenagakerjaan dipicu oleh regulasi-regulasi tertentu yang berhubungan dan mengatur hal tersebut. Sedangkan kategori keterlibatan masyarakat banyak diungkapkan karena tren pengungkapan di Indonesia memang masih terfokus pada hal ini.

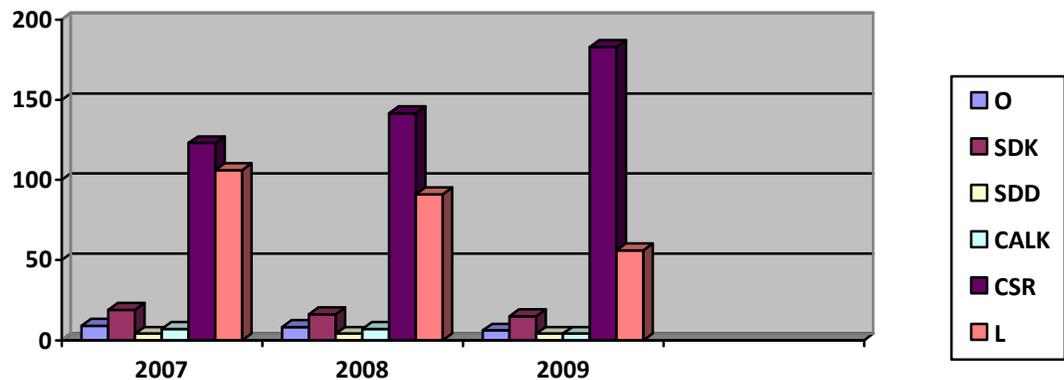
4.3 Lokasi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Lokasi pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan tempat dimana pengungkapan tersebut diungkapkan. Berdasarkan utomo (2000) dalam Masnila (2006) terdapat beberapa bagian atau lokasi pengungkapan dalam laporan tahunan, yaitu :

- 1) Overview
- 2) Surat dari dewan komisaris
- 3) Surat dari dewan direksi
- 4) Catatan atas laporan keuangan
- 5) Lokasi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian (lihat lampiran B), lokasi pengungkapan tanggung jawab sosial telah terjadi perubahan signifikan yaitu menjadi 6 lokasi yaitu :

- 1) Overview
- 2) Surat dari dewan komisaris
- 3) Surat dari dewan direksi
- 4) Catatan atas laporan keuangan
- 5) Corporate social responsibility
- 6) Lokasi lainnya



Gambar 4.1 lokasi pengungkapan tanggung jawab sosial

Sumber : Data Sekunder (data diolah)

Pada tahun 2007 (lihat gambar 4.1) lokasi yang paling banyak dipilih oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah lokasi Corporate Sosial Responsibility (CSR) sebanyak 123 perusahaan. Sedangkan lokasi yang paling sedikit diminati adalah surat dewan direksi (SDD) sebanyak 4 perusahaan. Terjadi perubahan lokasi untuk tahun 2008, meskipun lokasi CSR tetap yang paling diminati tetapi jumlahnya mengalami pertambahan sebanyak 19 perusahaan menjadi 142 perusahaan. Sedangkan lokasi lainnya di tahun 2008 mengalami penurunan yang berarti yaitu sebanyak 15 perusahaan.

Bagi tahun 2009, lokasi CSR masih menduduki peringkat pertama sebanyak 183 perusahaan. Perubahan terjadi pada lokasi lainnya yang terus menurun peminatnya menjadi 56 perusahaan serta lokasi-lokasi yang lain juga ikut menurun meski tidak secara besar. Hal ini menandakan dari tahun ke tahun lokasi CSR semakin diminati untuk lokasi pengungkapan tanggung jawab sosial dan perusahaan semakin peduli serta fokus pada masalah lingkungan dan sosial.

Berdasarkan penelitian Utomo (2000) lokasi pengungkapan yang paling banyak dipilih adalah catatan atas laporan keuangan (CALK), sedangkan pada

penelitian Masnila (2006) perusahaan cenderung memilih overview sebagai lokasi pengungkapan. Hal ini dimaksudkan karena pengungkapan dan pelaksanaan aktifitas CSR masih dianggap sebagai pengungkapan sukarela. Tetapi seiring berjalanya waktu, aktifitas CSR dirasa makin penting untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder*.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2007) dalam Mulyanita (2009) tentang perbandingan harga saham dan volume saham sebelum dan setelah pengumuman ISRA (*Indonesian Sustainability Reporting Awards*) dan menemukan bahwa ternyata informasi itu tidak direspon oleh investor, dimana harga saham dan volume perdagangan keempat perusahaan (PT Astra International, Tbk. PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Bank Danamon dan PT PP London Sumatera, Tbk) yang meraih award tidak mengalami perubahan.

Sebagian besar perusahaan pada tahun 2007 (lihat lampiran B) telah memilih lokasi pengungkapan pada lokasi tersendiri yaitu sebesar 45.9 % dari jumlah data perusahaan yang mengungkapkan CSR. Sedangkan untuk tahun 2008 sebanyak 142 perusahaan atau 52.98% telah mengungkapkan pada lokasi tersendiri. Di tahun 2009 pengungkapan tanggung jawab sosial pada lokasi tersendiri juga mengalami kenaikan 15.3% yaitu sebesar 68.28%.

Hal ini menunjukkan perubahan yang positif. Kenaikan dari tahun ke tahun ini membuktikan bahwa telah banyak perusahaan yang menganggap penting untuk memfokuskan diri terhadap CSR. Dengan tempat tersendiri juga akan meningkatkan citra perusahaan di mata investor terutama investor asing dan *stakeholder* yang peduli tentang kegiatan CSR perusahaan. Sehingga mereka tidak perlu sulit mencari untuk mengetahui kegiatan CSR apa yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, menandakan perusahaan memberikan ruang untuk masalah sosial dan lingkungan untuk lebih informatif dalam memenuhi kebutuhan stakeholders.

Anwar dalam Nurkhin (2009) yang meneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility* perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan harga

saham. Hasilnya menyimpulkan bahwa CSR memberikan pengaruh positif terhadap hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dan harga saham di pasar modal.

Pengungkapan CSR memberikan pengaruh positif hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dengan harga saham di pasar modal. Pengungkapan CSR dalam laporan keuangan tahunan perusahaan memperkuat citra perusahaan dan menjadi sebagai salah satu pertimbangan yang diperhatikan investor maupun calon investor memilih tempat investasi karena menganggap bahwa perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* (GCG) yang baik karena pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari GCG dan memberikan image kepada masyarakat bahwa perusahaan tidak lagi mengejar hanya profit semata tetapi sudah memperhatikan lingkungan dan masyarakat dengan menjalankan prinsip *triple bottom line*.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori agency bahwa dengan adanya pengungkapan yang transparansi yang dilakukan pihak manajemen perusahaan termasuk pengungkapan CSR memberikan kesan kepada principal bahwa perusahaan *growth* dan akan memiliki keberlanjutan.

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi.

Lokasi lainya yang dapat dipilih perusahaan sebagai tempat mengungkapkan tanggung jawab sosial adalah pada tata kelola perusahaan, visi dan misi perusahaan serta pada analisa dan pembahasan oleh manajemen. Dilihat dari tabel hasil ,sebanyak 106 perusahaan di tahun 2007 yang mengungkapkan pada lokasi lainnya, yang terdiri dari 16 perusahaan atau 5.97% pada analisa dan pembahasan oleh manajemen dan 92 atau 34,32% pada tata kelola perusahaan. Untuk tahun 2008 sebanyak 14 atau 5%

perusahaan yang mengungkapkan pada analisa dan pembahasan oleh manajemen dan 79 atau 28.30% pada tata kelola perusahaan. Sedangkan tahun 2009 sebanyak 56 perusahaan memilih lokasi lainnya, 9 perusahaan atau 3.6% mengungkapkan pada analisis dan pembahasan manajemen dan sisanya sebanyak 48 atau 17,2% pada tata kelola perusahaan.

Pemilihan lokasi lainnya yang berpusat pada analisis dan pembahasan manajemen dan tata kelola perusahaan adalah fenomena yang sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan, merupakan hak manajemen untuk memilih apa, kapan, dimana, dan kepada siapa kegiatan atau program CSR tersebut dilakukan. Jadi sudah sepantasnya pengungkapannya pada lokasi analisa dan pembahasan oleh manajemen. Untuk lokasi tata kelola perusahaan, masih banyak perusahaan yang menganggap bahwa tindakan CSR erat hubungannya dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik.

Anggraini (2006) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial di dalam laporan keuangan tahunan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa persentase kepemilikan manajemen dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial.

Nurkhin (2009) juga melakukan penelitian tentang *corporate governance* dan profitabilitas serta pengaruhnya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Profitabilitas terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan mengungkapkan informasi CSR yang telah dilakukan. Hal ini mungkin dikarenakan persepsi atau anggapan bahwa aktivitas CSR bukanlah aktivitas yang merugikan dan tidak bermanfaat bagi keberlangsungan perusahaan.

Melainkan aktivitas CSR merupakan langkah strategis jangka panjang yang akan memberikan efek positif bagi perusahaan.

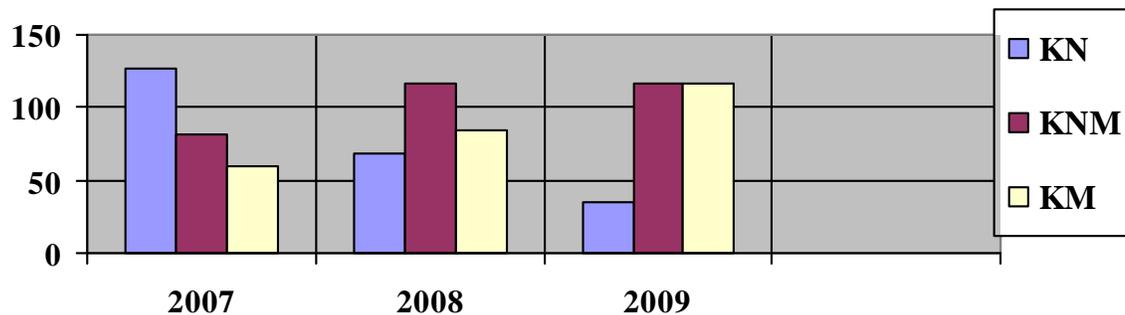
Hasil penelitian ini juga berhasil mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen memberikan pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti sesuai keberadaan dewan komisaris independen di Indonesia yang diatur dengan Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004 mampu memberikan monitor yang positif yaitu dalam mengawasi kegiatan manajemen dalam pengungkapan CSR.

Selain teori agensi, hasil pemilihan lokasi pengungkapan juga mendukung teori *stakeholder* dan legitimasi. Semakin banyak perusahaan yang mengungkapkan CSR secara tersendiri, dimana akan banyak ruang yang disediakan untuk mengungkapkan aktifitas CSR yang dilaksanakan perusahaan. Maka akan semakin banyak pula kepentingan-kepentingan berbagai *Stakeholder* yang diungkapkan. Jika semakin banyak yang diungkapkan, maka akan semakin banyak mendapatkan pengakuan (legitimasi) oleh masyarakat.

4.5 Tipe Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Penelitian Utomo (2000) dalam Masnila (2006), tipe pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam prakteknya terdiri dari tiga tingkatan yaitu :

- 1) Kualitatif Naratif (KN)
- 2) Kuantitatif Non Moneter (KNM)
- 3) Kuantitatif Moneter (KM)



Gambar 4.2 Tipe pengungkapan tanggung jawab sosial

Sumber : Data sekunder (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.2 (lihat lampiran B), tahun 2007 sebagian besar, sebanyak 146 perusahaan, memilih tipe pengungkapan kualitatif naratif yaitu merupakan tipe pengungkapan yang berupa narasi atau pernyataan tanpa angka yang mendukung. Sedangkan tipe yang paling sedikit dipilih adalah tipe kuantitatif moneter yaitu sebanyak 60 perusahaan. Untuk tahun 2008, tipe pengungkapan yang dipilih perusahaan beralih pada tipe kuantitatif non moneter dengan angka-angka tanpa satuan uang, yaitu sebanyak 116 perusahaan atau 43.28% dari keseluruhan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Angka-angka disini dapat berupa jumlah tempat yang telah disalurkan atau jumlah orang yang telah menerima bantuan. Contohnya, PT Unilever Indonesia Tbk membina petani untuk menggarap lebih dari 600 hektar kedelai hitam hingga berkontribusi sekitar 30 persen kebutuhan produksi Kecap Bango.

Pada tahun 2009, meski tidak mengalami banyak perubahan seperti tahun 2008 yaitu tipe yang paling banyak dipilih tetap tipe kuantitatif non moneter. Tetapi telah banyak perusahaan yang beralih memilih tipe pengungkapan kuantitatif moneter yaitu pernyataan yang didukung oleh angka-angka dalam satuan uang. Tipe KM ini mengalami penambahan berarti sebanyak 32 perusahaan menjadi 116 perusahaan. Contohnya, PT HM Sampoerna, Tbk untuk mengembangkan pendidikan melalui

Sampoerna Foundation, untuk program ini Sampoerna sendiri telah mengucurkan dana tak kurang dari 47 miliar.

Pemilihan tipe yang beragam oleh perusahaan menimbulkan banyak spekulasi. Pemilihan tipe kuantitatif moneter akan membuat *stakeholder* semakin percaya akan aktifitas CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan terutama jika didukung oleh foto-foto serta keterangan tujuan yang jelas. *Stakeholder* akan lebih memberikan pengakuan pada perusahaan yang secara jelas menerangkan kegiatan dan biaya sosial yang dikeluarkan. Sedangkan pemilihan tipe kualitatif naratif dan kuantitatif non moneter dapat dimaksudkan karena perusahaan mengalami kesulitan untuk menghitung biaya sosial yang dikeluarkan.

Peneliti *Public Interest Research and Advocacy* (PIRAC) memandang bahwa sumbangan sosial perusahaan yang menurut catatan media selama tahun 2001 mencapai Rp. 115 Milyar (perusahaan MNC= Rp. 79,1Milyar, Nasional= Rp. 30,2 Milyar, dan lokal= Rp. 6 Milyar), sebagai sebuah potensi yang sangat signifikan bagi agenda pemberdayaan masyarakat. Dalam laporan hasil survey disebutkan bahwa hampir semua sumbangan itu diberikan secara karitatif. Sumbangan terbesar diberikan dalam bentuk tunai untuk alokasi pelayanan sosial, khususnya sumbangan bencana (82%), menyusul kemudian sumbangan untuk kegiatan keagamaan (61%), pendidikan (57%), lingkungan (38%), ekonomi (33%), kesehatan (33%), seni budaya (30%), hukum dan advokasi (3%). Rata-rata sumbangan itu dikeluarkan sebagai hibah, *joint promotion*, *special event*, dan zakat perusahaan. Sebagian besar (81%) sumbangan diberikan secara langsung kepada kelompok sasaran. Kebijakan tentang besaran dan pilihan kelompok sasaran diputuskan langsung oleh eksekutif puncak perusahaan (Saidi,2003).

Berdasarkan teori agensi yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer (agen) dan principal (pemilik). Pemilik atau stakeholder ingin mengetahui semua informasi di perusahaan termasuk aktifitas manajemen dan sesuatu yang terkait investasi dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meminta

pertanggungjawaban atas kinerja manajer. Kegiatan CSR dapat menguntungkan agen (manajer) dan principal (*stakeholder*).

Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas (Sembiring, 2005).

Teori ini juga didukung oleh teori *stakeholder*, teori legitimasi dan teori ekonomi politik. Teori ekonomi politik menjelaskan tidak hanya reaksi stakeholder tetapi juga menjelaskan laporan akuntansi dipandang sebagai dokumen sosial, politik dan ekonomi. Dengan mempertimbangkan ekonomi politik, entitas akan lebih mampu untuk kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan isu yang berpengaruh atas kegiatan organisasi dan informasi yang akan diungkapkan.

Teori legitimasi dan *stakeholder* adalah prespektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Karena pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan sosial untuk memberikan legitimasi. Pengungkapan CSR berguna bagi perusahaan selain untuk nilai tambah perusahaan juga mengurangi biaya sosial yang timbul nanti dari aktifitas perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan CSR yang baik dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku akan berimplikasi pada iklim penanaman modal yang kondusif. Untuk bisa mewujudkan CSR setiap pelaku usaha (investor) baik dalam maupun asing yang melakukan kegiatan di wilayah RI wajib melaksanakan aturan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia, sebaliknya pemerintah sebagai regulator wajib dan secara konsisten menerapkan aturan dan sanksi apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan penelitian laporan tahunan tahun 2007, pola pengungkapan yang banyak dipilih oleh perusahaan adalah penggunaan lokasi CSR secara tersendiri dan untuk tipe memilih kualitatif naratif. PT united Tractors Tbk dan PT Astra Internasional Tbk merupakan perusahaan yang paling banyak melakukan pengungkapan yaitu 70 item pengungkapan.
- 2) Berdasarkan penelitian laporan tahunan tahun 2008, pola pengungkapan yang banyak dipilih perusahaan adalah penggunaan lokasi CSR secara tersendiri dan untuk tipe memilih kuantitatif non moneter. PT united Tractors Tbk sebanyak 70 item dan PT Energi Mega Persada sebanyak 69 item pengungkapan.
- 3) Berdasarkan penelitian laporan tahunan tahun 2009, perusahaan yang paling banyak mengungkapkan tema pengungkapan tanggung jawab sosial adalah PT semen Gresik Tbk sebanyak 74 item dan PT Bakrieland Development sebanyak 70 item pengungkapan. Lokasi pengungkapan yang dipilih paling

banyak adalah lokasi CSR. Sedangkan untuk tipe pengungkapan yang dipilih paling banyak adalah kuantitatif non moneter.

- 4) Berdasarkan hasil penelitian tema yang paling sering diungkapkan adalah tema lingkungan, tanggung jawab produk, kesehatan dan keselamatan kerja dan keterlibatan masyarakat dalam perusahaan. Ini sesuai dengan teori stakeholder bahwa sudah seharusnya perusahaan memberikan manfaat bagi seluruh Stakeholder agar mendapatkan legitimasi secara keseluruhan.
- 5) Berdasarkan hasil penelitian analisis pola pengungkapan CSR, sangat berhubungan dengan teori *stakeholder*, teori legitimasi, teori agensi serta teori ekonomi politik. Karena keseluruhan teori ini saling mempengaruhi dan mendukung pentingnya pelaksanaan CSR oleh perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan diharapkan lebih fokus dalam melaksanakan kegiatan CSR agar tepat guna dan tepat sasaran sehingga tidak ada yang merasa dirugikan serta lebih variatif dalam mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya.
- b. Bagi Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya CSR dalam mewujudkan iklim penanaman modal di Indonesia dan mengawasi serta member sanksi yang tegas agar seluruh perusahaan berkeinginan melaksanakan CSR.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama sehingga akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya serta menambah jumlah sampel.
- d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan peraturan-peraturan yang terbaru sehingga dapat dianalisis lebih mendalam pola apa yang paling baik digunakan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

5.3 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapatnya unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan, dimana tidak adanya suatu ketentuan baku dalam penentuan standar, sehingga nilai pengungkapan yang diperoleh dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagian besar berupa data laporan tahunan perusahaan sehingga tidak semua item di dalam daftar pengungkapan sosial di ungkapkan secara jelas sebagaimana di dalam laporan keberlanjutan.
3. Indikator pengungkapan tema tanggung jawab sosial menggunakan metode lama sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan indikator terbaru.

Lampiran A

Daftar Nama Perusahaan yang Melakukan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

No	Kode	Nama Perusahaan	Jenis Perusahaan
1	BIL	Bisi International Tbk	AGRICULTURE
2	AAL	Astra Agro Lestari Tbk	AGRICULTURE
3	BSP	Bakrie Sumatra Plantations Tbk	AGRICULTURE
4	PLS	PP London Sumatra Tbk	AGRICULTURE
5	SAO	Sampoerna Agro Tbk	AGRICULTURE
6	SRT	SMART Tbk	AGRICULTURE
7	TBL	Tunas Baru Lampung Tbk	AGRICULTURE
8	MAI	Multibreeder Adirama Ind. Tbk	AGRICULTURE
9	CPO	Central Proteinaprima Tbk	AGRICULTURE
10	IKA	Inti Kapuas Arowana Tbk	AGRICULTURE
11	ATS	ATPK Resources Tbk	MINING
12	BRS	Bumi Resources Tbk	MINING
13	ITM	Indo Tambangraya Megah Tbk	MINING
14	TBB	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	MINING
15	APD	Apexindo Pratama Duta Tbk	MINING
16	EMP	Energi Mega Persada Tbk	MINING
17	ATM	Aneka Tambang (Persero) Tbk	MINING
18	INI	International Nickel Indonesia Tbk	MINING
19	TMH	Timah Tbk	MINING
20	CKI	Central Korporindo International Tbk	MINING
21	HID	Holcim Indonesia Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
22	ITP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
23	SGK	Semen Gresik Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
24	AFG	Asahimas Flat Glass Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
25	STI	Surya Toto Indonesia Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
26	CTD	Citra Tobindo Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
27	IAD	Indal Aluminium Industry Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
28	LMW	Lion Metal Works Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
29	LMP	Lionmesh Prima Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
30	PIC	Pelangi Indah Canindo Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
31	BAJ	Budi Acid Jaya Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
32	CIA	Colorpak Indonesia Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
33	EWT	Eterindo Wahanatama Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
34	IAD	Indo Acidatama Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
35	IWI	Intanwijaya International Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
36	RAI	Resource Alam Indonesia Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
37	SAP	Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
38	UIC	Unggul Indah Cahaya Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
39	AKU	Aneka Kemasindo Utama Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
40	AKP	Argha Karya Prima Ind. Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
41	API	Asiaplast Industries Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
42	BLA	Berlina Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
43	DPT	Dynaplast Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
44	FNI	Fatrapolindo Nusa Industri Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
45	TST	Trias Sentosa Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
46	CPI	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
47	JCI	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
48	SPC	Sierad Produce Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
49	BPC	Barito Pasific Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
50	SLJ	Sumalindo Lestari Jaya Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
51	TMR	Tirta Mahakam Resources Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
52	FSW	Fajar Surya Wisesa Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
53	IKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
54	PTK	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
55	TPL	Toba Pulp Lestari Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
56	SAP	Surabaya Agung Industry Pulp Tbk	BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS

57	AIT	Astra International Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
58	AOP	Astra Otoparts Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
59	GTG	Gajah Tunggal Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
60	GYI	Goodyear Indonesia Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
61	IKD	Indo Kordsa Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
62	ISI	Indomobil Sukses International Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
63	MAS	Multistrada Arah Sarana Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
64	NPS	Nipress Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
65	STS	Selamat Sempurna Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
66	CTX	Centex (Preferred Stock) Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
67	EXD	Eratex Djaja Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
68	IRS	Indorama Synthetics Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
69	PKI	Panasia Flament Inti Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
70	PIO	Panasia Indosyntec Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
71	PIA	Polychem Indonesia Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
72	PEP	Polysindo Eka Perkasa Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
73	TFC	Tifico Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
74	UTX	Unitex Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
75	PAI	Primarindo Asia Infrastructur Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
76	SBT	Sepatu Bata Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
77	GTK	GT Kabel Indonesia Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
78	KMN	Kabelindo Murni Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
79	SIK	Sumi Indo Kabel Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
80	VEK	Voksel Electric Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
81	TPI	Try Polyta Indonesia Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
82	SNP	Sat Nusapersada Tbk	MISCELLANEOUS INDUSTRY
83	AGM	Aqua Golden Mississippi Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
84	CKR	Cahaya Kalbar Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
85	DMA	Dovamas Abadi Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
86	DDT	Delta Djakarta Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
87	ISM	Indofood Sukses Makmur Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
88	MIH	Mayora Indah Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
89	MBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
90	SBI	Sekar Bumi Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
91	SLT	Sekar Laut Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
92	STP	Siantar Top Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
93	UJM	Ultra Jaya Milk Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
94	BAT	BAT Indonesia Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
95	GGM	Gudang Garam Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
96	HMS	HM Sampoerna Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
97	BMS	Bristol-Myers Squibb Indonesia (PS) Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
98	DVL	Darya-Varia Laboratoria Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
99	IFA	Indofarma Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
100	KFA	Kalbe Farma Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
101	KMF	Kimia Farma Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
102	MRC	Merck Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
103	PFA	Pyridam Farma Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
104	MIN	Mandom Indonesia Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
105	MRU	Mustika Ratu Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
106	SLB	Sara Lee Body Care Indonesia Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
107	ULR	Unilever Indonesia Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
108	KIC	Kedaung Indah Can Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
109	KSI	Kedawung Setia Industrial Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
110	LMI	Langgeng Makmur Industri Tbk	CONSUMER GOODS INDUSTRY
111	ASR	Alam Sutera Realty Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
112	BDM	Bakrieland Development Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
113	BIP	Bhuanatala Indah Permai Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
114	BMS	Bintang Mitra Semestaraya Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
115	CTD	Ciputra Development Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
116	CTP	Ciputra Property Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
117	CDM	Cowell Development Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING

			CONSTRUCTION
118	DYA	Danayasa Arthatama Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
119	DPW	Duta Pertiwi Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
120	IPP	Indonesia Prima Property Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
121	JRP	Jaya Real Property Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
122	KIJ	Kawasan Industri Jababeka Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
123	LCR	Lippo Cikarang Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
124	LKC	Lippo Karawaci Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
125	MDR	Modernland Realty Ltd. Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
126	PJT	Pakuwon Jati Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
127	RBM	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
128	SCT	Sentul City Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
129	SRA	Summarecon Agung Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
130	SIP	Suryainti Permata Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
131	SDM	Suryamas Dutamakmur Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
132	AKY	Adhi Karya Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
133	DGI	Duta Graha Indah Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
134	JKM	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
135	SSI	Surya Semesta Internusa Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
136	TBI	Total Bangun Persada Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
137	TME	Truba Alam Manunggal Engineering Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
138	WKY	Wijaya Karya (Persero) Tbk	PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
139	NIR	Nusantara Infrastruktur Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
140	PGN	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
141	CMN	Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
142	JMR	Jasa Marga Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
143	BTE	Bakrie Telecom Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
144	ECP	Exelcomindo Pratama Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
145	IND	Indosat Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
146	MTE	Mobile-8 Telecom Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
147	TIN	Telekomunikasi Indonesia Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
148	APO	Arpeni Pratana Ocean Line Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
149	BLT	Berlian Laju Tanker Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
150	HIT	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
151	IAT	Indonesia Air Transport Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
152	MRA	Mitra Rajasa Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
153	PTR	Panorama Transportasi Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
154	PTM	Pelayaran Tempuran Emas Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
155	RTI	Rig Tenders Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
156	SIN	Samudera Indonesia Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
157	SSF	Steady Safe Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
158	ZNA	Zebra Nusantara Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
159	BTU	Bukaka Teknik Utama Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
160	DHW	Darma Herwa Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
161	PTA	Petrosea Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION
162	IEY	Indika Energy Tbk	INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION

163	BAG	Bank Agroniaga Tbk	FINANCE
164	BGI	Bank Artha Graha Internasional Tbk	FINANCE
165	BBK	Bank Bukopin Tbk	FINANCE
166	BBA	Bank Bumi Artha Tbk	FINANCE
167	BBP	Bank Bumiputera Indonesia Tbk	FINANCE
168	BCI	Bank Capital Indonesia Tbk	FINANCE
169	BCA	Bank Central Asia Tbk	FINANCE
170	BDI	Bank Danamon Indonesia Tbk	FINANCE
171	BHS	Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	FINANCE
172	BII	Bank Internasional Indonesia Tbk	FINANCE
173	BKW	Bank Kesawan Tbk	FINANCE
174	BMD	Bank Mandiri (Persero) Tbk	FINANCE
175	BMP	Bank Mayapada Tbk	FINANCE
176	BMG	Bank Mega Tbk	FINANCE
177	BNI	Bank Negara Indonesia Tbk	FINANCE
178	CIM	Bank Niaga Tbk	FINANCE
179	OCB	Bank NISP Tbk	FINANCE
180	PNB	Bank Pan Indonesia Tbk	FINANCE
181	BPT	Bank Permata Tbk	FINANCE
182	BRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FINANCE
183	BSD	Bank Swedesi Tbk	FINANCE
184	UOB	Bank UOB Buana Tbk	FINANCE
185	BVT	Bank Victoria International Tbk	FINANCE
186	BTP	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	FINANCE
187	ADM	Adira Dinamika Multi Finance Tbk	FINANCE
188	BFI	BFI Finance Indonesia Tbk	FINANCE
189	BFN	Buana Finance Tbk	FINANCE
190	CFI	CFI Clipan Finance Indonesia Tbk	FINANCE
191	MMF	Mandala Multifinance Tbk	FINANCE
192	WOM	Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	FINANCE
193	AKS	Asia Kapitalindo Securities Tbk	FINANCE
194	HDL	Hortus Danavest Tbk	FINANCE
195	KGS	Kresna Graha Securindo Tbk	FINANCE
196	PGS	Panca Global Securities Tbk	FINANCE
197	PSK	Panin Securitas Tbk	FINANCE
198	RSS	Reliance Securities Tbk	FINANCE
199	TMS	Trimega Securities Tbk	FINANCE
200	YSK	Yulie Securindo Tbk	FINANCE
201	ABI	Asuransi Bintang Tbk	FINANCE
202	AHA	Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	FINANCE
203	AJT	Asuransi Jasa Tania Tbk	FINANCE
204	MAG	Asuransi Multi Artha Guna Tbk	FINANCE
205	LGI	Lippo General Insurance Tbk	FINANCE
206	MRI	Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	FINANCE
207	PIS	Panin Insurance Tbk	FINANCE
208	PLI	Panin Life Tbk	FINANCE
209	BIV	Bhakti Investama Tbk	FINANCE
210	LSK	Lippo Securities Tbk	FINANCE
211	PUT	Pacific Utama Tbk	FINANCE
212	SMM	Sinar Mas Multi Artha Tbk	FINANCE
213	AGS	Agis Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
214	AKR	AKR Corporindo Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
215	EPM	Enseval Putra Mega Trading Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
216	FKS	FKS Multi Agro Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
217	HAP	Hexindo Adi Perkasa Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
218	ICP	Intraco Penta Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
219	LLS	Lautan Luas Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
220	MPF	Modern Photo Flim Company Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
221	MIC	Multi Indocitra Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
222	OPD	Okansa Persada Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
223	TRS	Tiga Raksa Satria Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
224	TAT	Tira Austenite Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
225	TRN	Tunas Ridean Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
226	UTR	United Tractors Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
227	WPM	Wahana Phonix Mandiri Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
228	AHI	Ace Hardware Indonesia Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT

229	CIS	Courts Indonesia Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
230	MPP	Matahari Putra Prima Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
231	MAP	Mitra Adiperkasa Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
232	RLS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
233	RCL	Rimo Catur Lestari Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
234	STI	Sonatopas Tourism Industry Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
235	TGA	Toko Gunung Agung Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
236	ATT	Anta Expres Tour & Travel Service Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
237	BBN	Bayu Buana Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
238	HSJ	Hotel Sahid Jaya Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
239	ICI	Island Concepts Indonesia Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
240	JHD	Jakarta Internasional Hotel Develpoment Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
241	JSI	Jakarta Setia Budi Internasional Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
242	MMI	Mas Murni Indonesia Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
243	PSW	Panorama Sentra Wisata Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
244	PSA	Pelita Sejahtera Abadi Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
245	PJA	Pembangunan Jaya Ancol Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
246	PGI	Pioneerindo Gourment International Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
247	PIR	Plaza Indonesia Reality Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
248	PAS	Pudjiadi Sons Estate Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
249	PPL	Pudjiadi Restige Limeted Abdi Bangsa Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
250	ABS	Abdi Bangsa Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
251	FIS	Fortune Indonesia Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
252	JTP	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
253	MNC	Media Nusantara Citra Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
254	SCM	Surya Citra Media Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
255	TIM	Tempo Initi Media Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
256	AGH	Astra Graphia Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
257	COL	Centrin Online Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
258	ITG	Integrasi Teknologi Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
259	LCI	Limas Centric Indonesia Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
260	MDE	Metro Data Electronic Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
261	MTP	Multipolar Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
262	MTG	Myoh Teknologi Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
263	BAB	Bakrie Brother Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
264	GMC	Global Mediacom Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
265	JAS	Jasa Angkasa Semesta Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
266	RUI	Radiant Utama Tbk	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
267	DTN	Destinasi Tirta Nusantara	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT
268	KIA	Kokoh Inti Arebama	TRADE, SERVICE, AND INVESTMENT

Sumber : Bursa Efek Indonesia dan www.idx.co.id

Lampiran B

2007

No	Lokasi pengungkapan	Jumlah Perusahaan	presentase
1	Overview (O)	9	3.35
2	Surat dari Dewan Komisaris (SDK)	19	7.1
3	Surat dari Dewan Direksi (SDD)	4	1.5
4	Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)	7	2.6
5	Corporate Social Responsibility (CSR)	123	45.9
6	Lokasi Lainnya (L)	106	39.55
	Jumlah	268	100

Sumber : Data Sekunder, data diolah

2008

No	Lokasi pengungkapan	Jumlah Perusahaan	presentase
1	Overview (O)	8	3
2	Surat dari Dewan Komisaris (SDK)	16	5.97
3	Surat dari Dewan Direksi (SDD)	4	1.5
4	Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)	7	2.6
5	Corporate Social Responsibility (CSR)	142	52.98
6	Lokasi Lainnya (L)	91	33.95
	Jumlah	268	100

Sumber : Data sekunder, data diolah

2009

No	Lokasi pengungkapan	Jumlah Perusahaan	presentase
1	Overview (O)	6	2.24
2	Surat dari Dewan Komisaris (SDK)	15	5.6
3	Surat dari Dewan Direksi (SDD)	4	1.5
4	Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)	4	1.5
5	Corporate Social Responsibility (CSR)	183	68.28

6	Lokasi Lainnya (L)	56	20.88
	Jumlah	268	100

Sumber : Data Sekunder, data diolah

2007

No	Tipe Pengungkapan Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Presentase
1	Kualitatif Naratif (KN)	126	47
2	Kuantitatif Non Moneter (KNM)	82	30.6
3	Kuantitatif Moneter (KM)	60	22.4
	Jumlah	268	100

Sumber : Data Sekunder, data diolah

2008

No	Tipe Pengungkapan Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Presentase
1	Kualitatif Naratif (KN)	68	25.37
2	Kuantitatif Non Moneter (KNM)	116	43.28
3	Kuantitatif Moneter (KM)	84	31.35
	Jumlah	268	100

Sumber : Data Sekunder, data diolah

2009

No	Tipe Pengungkapan Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Presentase
1	Kualitatif Naratif (KN)	35	13.05
2	Kuantitatif Non Moneter (KNM)	117	43.65

3	Kuantitatif Moneter (KM)	116	43.3
	Jumlah	268	100

Sumber : Data Sekunder, data diolah

BASIC INDUSTRY A 2008

No	Kategori	I T P 08	H I D 08	P I C 08	S T I 08	I A D 08	E W T 08	R A I 08	B L A 08	S L J 08	T M R 08	S A P 08	P T K 08	U I C 08	B A J 08	C P I 08	T S T 08	S P C 08	J C I 08	F S W 08	L M P 08	L M W 08	A F G 08	S G K 08	T P L 08	S A W 08	D P T 08	A K P 08	F N I 08	
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan ligkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamai daratan atau reboisasi	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas	√	√	√		√	√	√	√	√		√	√	√					√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Penggunaan material daur ulang	√		√										√						√	√		√	√	√					
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan	√	√							√	√	√		√					√	√			√	√	√	√	√			√
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lngkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√	√	√	√		√		√	√		√	√	√	√	√	√	√		√	√		√	√	√	√	√	√		
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah		√			√					√		√			√		√		√	√		√	√		√	√	√		
11	Pengolahan limbah				√				√	√	√	√	√	√	√				√	√	√		√	√	√	√				

7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat						√	√	√	√	√	√	√	√						√				√	√	√			√
8	Mensponsori kampanye nasional	√	√	√			√			√		√	√		√	√	√	√	√	√	√		√	√	√		√		√
9	Mendukung pengembangan industri lokal		√			√		√	√	√					√		√	√	√	√				√	√	√			
Umum																													
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Total item yang diharapkan diungkapkan	57	62	48	47	53	51	51	55	57	51	59	56	56	57	51	50	51	67	61	57	48	61	74	63	60	47	49	58

7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat		√				√	√	√	√	√	√	√		√				√	√			√	√	√			√	
8	Mensponsori kampanye nasional	√	√	√			√			√		√	√		√	√	√	√	√	√		√	√	√		√		√	
9	Mendukung pengembangan industri lokal		√			√		√	√	√	√		√		√		√	√	√	√			√	√	√				
Umum																													
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Total item yang diharapkan diungkapkan	58	64	51	50	54	51	53	59	60	54	61	58	58	60	55	52	53	67	63	59	50	62	74	65	61	49	53	60

BASIC INDUSTRY A 2007

No	Kategori	I	H	P	S	I	E	R	B	S	T	S	P	U	B	C	T	S	J	F	L	L	A	S	T	S	D	A	F
		T	I	I	T	A	W	A	L	L	M	A	T	I	A	P	S	P	C	S	M	M	F	G	P	A	P	K	N
	Lingkungan	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√			√	√		√	√			√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√			√
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan ligkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamai daratan atau reboisasi	√	√			√	√	√		√	√		√	√				√		√	√			√	√	√			√
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas	√	√	√			√		√	√		√	√	√					√	√	√	√	√	√	√	√			
6	Penggunaan material daur ulang	√		√									√							√	√		√	√	√				
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan	√	√								√		√						√	√			√	√	√	√	√		
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lngkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√	√	√	√		√			√			√	√	√	√	√		√	√		√	√	√	√	√	√		
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah												√		√		√		√	√		√	√		√				

11	Pengolahan limbah								√		√	√	√	√	√				√	√	√		√	√	√	√			
12	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√
13	Perlindungan lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Energi																												
1	Menggunakan energy secara lebih efisien dalam kegiatan operasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Memfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi		√																√	√			√	√	√				
3	Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang		√	√									√						√	√			√	√	√				
4	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√		√			√	√	√	√	√	√	√		√		√
5	Pengungkapan peningkatan efisiensi energy dari produk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√				√	√	√	√	√	√	√		√	√	√
6	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk						√					√	√						√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan			√			√				√	√	√	√					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja																												
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja									√					√				√					√		√			
4	Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja	√	√	√	√	√		√	√	√									√			√		√	√	√		√	√
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	√	√			√	√	√		√	√	√	√	√	√	√		√	√		√		√	√	√	√		√	√

No	Kategori	P I S 08	R S S 08	Y S K 08	P S K 08	P G S 08	H D L 08	K G S 08	L G I 08	P U T 08	L S K 08	M R I 08	P L I 08	A B I 08	B I V 08	A H A 08	W D M 08	M A G 08	T M S 08	B F N 08	B F I 08	M M F 08	C F I 08	A K S 08	A J T 08	S M M 08	A D M 08				
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√	√	√		√	√	√	√				√	√			√	√	√	√	√				√	√				
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan ligkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamai daratan atau reboisasi		√				√			√			√	√			√	√	√	√	√	√					√	√			
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas		√									√						√			√						√				
6	Penggunaan material daur ulang		√																												
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan		√																									√			
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lngkungan	√	√		√		√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√			√		√		√	√			√			√		√	√	√	√	√					√				
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah	√			√												√	√	√		√	√					√				

No	Kategori	P I S 09	R S S 09	Y S K 09	P S K 09	P G S 09	H D L 09	K G S 09	L G I 09	P U T 09	L S K 09	M R I 09	P L I 09	A B I 09	B I V 09	A H A 09	W D M 09	M A G 09	T M S 09	B F N 09	B F I 09	M M F 09	C F I 09	A K S 09	A J T 09	S M M 09	A D M 09		
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√		√	√	√	√		√	√	√	√			
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamai daratan atau reboisasi	√	√	√			√			√	√		√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√		
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas	√	√									√					√	√			√					√			
6	Penggunaan material daur ulang		√																										
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan		√																								√		
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√	√	√	√	√	√		√	√		√				√		√	√	√	√	√			√		√		
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah	√			√					√	√	√					√	√	√		√	√					√		

No	Kategori	P I S 07	R S S 07	Y S K 07	P S K 07	P G S 07	H D L 07	K G S 07	L G I 07	P U T 07	L S K 07	M R I 07	P L I 07	A B I 07	B I V 07	A H A 07	W D M 07	M A G 07	T M S 07	B F N 07	B F I 07	M M F 07	C F I 07	A K S 07	A J T 07	S M M 07	A D M 07				
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√	√				√		√				√	√			√	√		√	√						√			
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√			√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√		√	√	√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan ligkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamai daratan atau reboisasi		√							√		√	√			√	√	√	√	√	√	√									
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas		√									√																			
6	Penggunaan material daur ulang		√																												
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan		√																												
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lngkungan	√	√		√		√			√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan									√			√					√	√	√											
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah																	√										√			

12	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan		√	√	√	√	√	√		√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
13	Perlindungan lingkungan hidup	√	√	√		√	√	√		√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Energi																											
1	Menggunakan energy secara lebih efisien dalam kegiatan operasi		√	√	√	√		√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Memfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi														√													
3	Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang																											
4	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi		√	√	√	√		√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Pengungkapan peningkatan efisiensi energy dari produk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√					√									
7	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan																											
	Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja																											
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja			√	√	√	√	√						√		√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
3	Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja																											
4	Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja	√		√			√	√							√			√		√	√		√	√				
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
7	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

8	Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Lain-lain Tentang Tenaga Kerja																											
1	Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Mengungkapkan persentase/ jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial				√																							
3	Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/ orang cacat dalam pekerjaan																											
4	Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat																											
5	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
6	Memberi bantuan keuangan kepada tenaga kerja dalam bidang pendidikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
7	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
8	Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan																					√						
9	Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan			√	√				√			√				√	√	√						√				
10	Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi			√	√		√				√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
11	Mengungkapkan persentase gaji untuk pension				√			√		√	√			√	√	√		√	√	√	√	√	√					
12	Mengungkapkan kebijakan pengajian dalam perusahaan				√			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
13	Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
14	Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

15	Mengungkapkan disposisi staff- dimana staff ditempatkan	√	√	√	√		√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							
16	Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka	√	√	√	√		√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
17	Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. Penjualan per tenaga kerja		√	√			√		√	√	√			√			√			√	√		√							
18	Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
19	Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja	√	√	√	√	√	√	√		√			√																	
20	Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain		√	√	√			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
21	Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
22	Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
23	Membuat laporan tenaga kerja terpisah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
24	Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
25	Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja																													
26	Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan																													
27	Peningkatan kondisi kerja secara umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
28	Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√						
29	Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√									√							
	Produk																													
1	Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan termasuk pengemasannya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						

7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat			√	√		√	√				√			√	√	√	√	√	√	√		√	√						
8	Mensponsori kampanye nasional	√	√	√	√	√		√			√	√		√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√				
9	Mendukung pengembangan industri lokal	√	√	√						√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
Umum																														
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
	Total item yang diharapkan diungkapkan	49	52	56	57	41	49	53	39	52	51	53	43	45	62	56	53	58	61	63	57	59	58	59	52					

12	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan		√	√	√	√	√	√		√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
13	Perlindungan lingkungan hidup	√	√	√		√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Energi																										
1	Menggunakan energy secara lebih efisien dalam kegiatan operasi		√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Memfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi													√													
3	Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang																										
4	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi		√	√	√	√		√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Pengungkapan peningkatan efisiensi energy dari produk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√			√	√								
7	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan																						√				
	Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja																										
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja		√	√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
3	Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja																										
4	Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja	√		√			√	√						√			√		√	√		√	√	√			
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
7	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

15	Mengungkapkan disposisi staff- dimana staff ditempatkan	√	√	√	√		√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
16	Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
17	Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. Penjualan per tenaga kerja		√	√			√		√	√	√			√		√	√		√		√	√	√	√					
18	Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
19	Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja	√	√	√	√	√	√	√		√			√																
20	Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain	√	√	√	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
21	Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
22	Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
23	Membuat laporan tenaga kerja terpisah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
24	Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
25	Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja																												
26	Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan																												
27	Peningkatan kondisi kerja secara umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
28	Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√					
29	Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√		√						√	√	√					
	Produk																												
1	Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan termasuk pengemasannya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					

7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat			√	√		√	√				√			√	√	√	√	√	√	√		√	√					
8	Mensponsori kampanye nasional	√	√	√	√	√		√	√		√	√		√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
9	Mendukung pengembangan industri lokal	√	√	√					√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
Umum																													
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Total item yang diharapkan diungkapkan	53	54	60	58	45	52	55	44	55	54	55	47	49	63	58	55	59	61	65	58	61	58	61	55				

12	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan		√					√		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
13	Perlindungan lingkungan hidup		√				√	√		√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Energi																												
1	Menggunakan energy secara lebih efisien dalam kegiatan operasi		√	√	√	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Memfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi														√														
3	Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang																												
4	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi		√	√	√	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Pengungkapan peningkatan efisiensi energy dari produk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√				√											
7	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan																												
	Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja																												
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja				√	√	√	√							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
3	Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja																												
4	Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja	√		√			√	√						√			√							√					
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
7	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

8	Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Lain-lain Tentang Tenaga Kerja																											
1	Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Mengungkapkan persentase/ jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial				√																							
3	Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/ orang cacat dalam pekerjaan																											
4	Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat																											
5	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Memberi bantuan keuangan kepada tenaga kerja dalam bidang pendidikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
7	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
8	Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan																					√						
9	Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan			√	√				√			√				√	√	√					√					
10	Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi			√	√		√						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
11	Pengungkapkan persentase gaji untuk pension				√			√		√	√			√	√	√		√	√	√	√	√	√					
12	Mengungkapkan kebijakan pengajian dalam perusahaan				√			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
13	Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
14	Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					

7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat			√	√		√	√				√			√	√	√	√	√	√	√		√	√					
8	Mensponsori kampanye nasional	√	√	√	√	√		√			√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
9	Mendukung pengembangan industri lokal	√	√	√						√	√	√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√				
Umum																													
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
	Total item yang diharapkan diungkapkan	47	46	52	54	39	47	50	36	48	50	47	40	44	62	54	51	57	60	62	53	54	51	55	48				

INFRASTRUCTUR 2008

No	Kategori	I N D 08	P T M 08	T I N 08	P G N 08	P T R 08	S S F 08	S I N 08	Z N A 08	J M R 08	H I T 08	C M N 08	D H W 08	I E Y 08	E C P 08	B T E 08	M T E 08	B L T 08	R T I 08	B T U 08	M R A 08	I A T 08	A P O 08	N I R 08	P T A 08				
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan ligkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamai daratan atau reboisasi	√		√	√		√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√		√						
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas				√				√	√		√	√			√			√						√				
6	Penggunaan material daur ulang																												
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan	√			√								√			√				√	√		√						
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lngkungan	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√	√	√	√		√			√		√	√	√	√	√			√	√	√		√	√					
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah			√	√				√	√		√	√		√				√		√			√					
11	Pengolahan limbah				√							√	√	√											√				

12	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
13	Perlindungan lingkungan hidup	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Energi																												
1	Menggunakan energy secara lebih efisien dalam kegiatan operasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Memfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi																												
3	Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang				√																								
4	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Pengungkapan peningkatan efisiensi energy dari produk				√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk				√		√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√							
7	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan				√		√			√	√	√	√			√	√	√			√		√						
	Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja																												
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja		√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
3	Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja			√		√			√	√	√		√												√				
4	Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√		√	√		√	√			√					
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	√		√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
7	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

15	Mengungkapkan disposisi staff- dimana staff ditempatkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
16	Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
17	Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. Penjualan per tenaga kerja	√		√	√			√	√		√		√	√	√	√		√				√						
18	Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
19	Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja	√		√	√																							
20	Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
21	Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
22	Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
23	Membuat laporan tenaga kerja terpisah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
24	Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
25	Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja	√				√	√		√	√		√																
26	Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan	√		√		√			√	√		√		√														
27	Peningkatan kondisi kerja secara umum	√	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
28	Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					√	√				
29	Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja	√		√	√				√		√			√														
	Produk																											
1	Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan termasuk pengemasannya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

2	Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk	√	√	√	√		√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
3	Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
4	Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Membuat produk lebih aman untuk konsumen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
7	Pengungkapan peningkatan kebersihan/ kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
8	Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
9	Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan	√		√	√	√	√	√			√		√	√	√	√			√				√						
10	Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√				
	Keterlibatan Masyarakat																												
1	Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/ pelajar	√	√	√	√			√	√	√	√			√	√	√	√					√		√					
3	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√				
4	Membantu riset medis	√		√				√			√	√		√									√	√					
5	Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni	√		√	√	√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Membiyai program beasiswa	√		√	√			√	√	√		√	√	√			√				√	√							

INFRASTRUCTUR 2009

No	Kategori	I N D 09	P T M 09	T I N 09	P G N 09	P T R 09	S S F 09	S I N 09	Z N A 09	J M R 09	H I T 09	C M N 09	D H W 09	I E Y 09	E C P 09	B T E 09	M T E 09	B L T 09	R T I 09	B T U 09	M R A 09	I A T 09	A P O 09	N I R 09	P T A 09				
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan ligkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamai daratan atau reboisasi	√		√	√		√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas				√				√	√		√	√			√			√						√				
6	Penggunaan material daur ulang																												
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan	√			√								√			√				√	√		√						
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lngkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√	√	√	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√		√	√	√		√	√					
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah	√	√	√	√	√	√		√	√		√	√	√	√	√			√		√			√	√				
11	Pengolahan limbah	√			√							√	√	√											√				

12	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
13	Perlindungan lingkungan hidup	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Energi																											
1	Menggunakan energy secara lebih efisien dalam kegiatan operasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Memfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi																											
3	Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang				√																							
4	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Pengungkapan peningkatan efisiensi energy dari produk		√		√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk				√		√			√	√	√	√					√	√	√	√	√						
7	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan	√	√		√		√			√	√	√	√			√	√	√	√			√		√				
	Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja																											
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
3	Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja			√		√			√	√	√		√												√			
4	Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√		√	√		√	√			√				
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	√		√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
7	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

2	Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk	√	√	√	√		√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
3	Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
4	Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Membuat produk lebih aman untuk konsumen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
7	Pengungkapan peningkatan kebersihan/ kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
8	Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
9	Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√				√						
10	Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√				
	Keterlibatan Masyarakat																												
1	Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/ pelajar	√	√	√	√			√	√	√	√			√	√	√	√					√		√					
3	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√				
4	Membantu riset medis	√		√				√			√	√		√								√	√	√					
5	Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni	√		√	√	√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Membiyai program beasiswa	√		√	√			√	√	√		√	√	√			√				√	√							

7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√		√				√				
8	Mensponsori kampanye nasional	√		√	√		√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
9	Mendukung pengembangan industri lokal	√		√	√				√	√		√	√	√	√	√	√	√			√	√							
Umum																													
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
	Total item yang diharapkan diungkapkan	64	46	66	67	51	49	49	55	64	61	64	65	61	62	59	55	55	58	53	56	51	58	46	51				

INFRASTRUCTUR 2007

No	Kategori	I N D 07	P T M 07	T I N 07	P G N 07	P T R 07	S S F 07	S I N 07	Z N A 07	J M R 07	H I T 07	C M N 07	D H W 07	I E Y 07	E C P 07	B T E 07	M T E 07	B L T 07	R T I 07	B T U 07	M R A 07	I A T 07	A P O 07	N I R 07	P T A 07				
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√					
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan ligkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamai daratan atau reboisasi			√	√			√			√	√	√	√	√	√	√		√		√			√					
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas				√				√		√	√							√						√				
6	Penggunaan material daur ulang																												
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan				√								√			√							√						
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lngkungan	√		√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√		√	√							√	√		√	√			√	√			√						
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah			√	√				√			√			√														
11	Pengolahan limbah				√							√	√	√											√				

12	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
13	Perlindungan lingkungan hidup	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Energi																											
1	Menggunakan energy secara lebih efisien dalam kegiatan operasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Memfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi																											
3	Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang				√																							
4	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Pengungkapan peningkatan efisiensi energy dari produk				√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk				√		√			√	√	√	√						√	√	√							
7	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan				√		√			√	√	√	√				√		√									
	Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja																											
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja				√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
3	Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja			√		√			√	√	√		√											√				
4	Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja	√		√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√		√	√					√				
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	√		√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
7	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

8	Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
	Lain-lain Tentang Tenaga Kerja																											
1	Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√						√	√	√				
2	Mengungkapkan persentase/ jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial																											
3	Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/ orang cacat dalam pekerjaan																											
4	Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat																											
5	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Memberi bantuan keuangan kepada tenaga kerja dalam bidang pendidikan	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√				
7	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan	√		√		√	√		√	√			√															
9	Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan			√					√	√	√		√			√			√			√			√			
10	Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi	√					√		√	√	√		√	√	√	√				√		√						
11	Mengungkapkan persentase gaji untuk pension	√		√	√				√	√		√																
12	Mengungkapkan kebijakan pengajian dalam perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√				

2	Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk	√	√	√	√		√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
3	Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
4	Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Membuat produk lebih aman untuk konsumen	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√							
6	Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√						
7	Pengungkapan peningkatan kebersihan/ kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
8	Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
9	Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan	√		√	√	√	√	√			√		√	√	√	√			√				√						
10	Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√				
	Keterlibatan Masyarakat																												
1	Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/ pelajar	√	√	√	√			√	√	√	√			√	√	√	√					√		√					
3	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√				
4	Membantu riset medis	√		√				√			√	√		√										√					
5	Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni	√		√	√	√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Membiyai program beasiswa	√		√	√			√	√	√		√	√	√			√				√	√							

7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√		√	√	√						√					
8	Mensponsori kampanye nasional	√		√	√				√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
9	Mendukung pengembangan industri lokal	√		√	√				√	√		√	√	√	√	√		√			√	√								
Umum																														
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Total item yang diharapkan diungkapkan	58	36	62	66	46	42	44	50	62	61	61	62	57	62	56	53	51	48	48	49	46	54	41	41					

MISCELLANEOUS 2008

No	Kategori	K M N 08	M A S 08	E X D 08	P F I 08	P I A 08	T F C 08	S B T 08	G T G 08	I K D 08	S T S 08	I R S 08	A O P 08	A I T 08	P E P 08	V E K 08	I S I 08	S N P 08	S I K 08	U T X 08	N P S 08	G Y I 08	C T X 08	P I O 08	G T K 08	P A I 08	T P I 08		
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas			√			√	√					√	√				√											
6	Penggunaan material daur ulang												√	√															
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan						√	√	√				√	√							√	√	√				√		
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√					√		√	√	√	√	√	√	√		√	√		√	√	√				√			
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah	√		√			√	√	√		√	√		√			√	√		√		√				√	√		

11	Pengolahan limbah		√		√		√	√				√	√							√	√	√	√	√				
12	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
13	Perlindungan lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Energi																											
1	Menggunakan energy secara lebih efisien dalam kegiatan operasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	Memfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi	√											√															
3	Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang												√															
4	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi		√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√		
5	Pengungkapkan peningkatan efisiensi energy dari produk	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
6	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk			√	√							√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√			
7	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan		√	√	√		√	√		√		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√		
	Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja																											
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
3	Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja									√			√								√							
4	Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√		
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja		√	√			√	√		√			√			√		√		√			√	√	√			
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√		√	√	√		√		√	√	√	√		

6	Membiyai program beasiswa			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√							√			√		
7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat		√						√				√	√						√			√	√			√	√
8	Mensponsori kampanye nasional		√	√	√		√	√	√		√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Mendukung pengembangan industri lokal								√	√	√		√	√				√			√	√					√	
	Umum																											
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Total item yang diharapkan diungkapkan	51	53	58	51	50	57	59	54	44	57	53	63	70	54	53	54	53	47	60	52	60	54	51	52	53	56	

MISCELLANEOUS 2009

No	Kategori	K M N 09	M A S 09	E X D 09	P F I 09	P I A 09	T F C 09	S B T 09	G T G 09	I K D 09	S T S 09	I R S 09	A O P 09	A I T 09	P E P 09	V E K 09	I S I 09	S N P 09	S I K 09	U T X 09	N P S 09	G Y I 09	C T X 09	P I O 09	G T K 09				
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan ligkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamai daratan atau reboisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas			√			√	√					√	√				√		√									
6	Penggunaan material daur ulang												√	√															
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan						√	√	√				√	√						√	√	√							
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lngkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√		√	√	√	√		√				
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah	√	√	√	√		√	√	√		√	√		√	√		√	√		√		√			√				

14	Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
15	Mengungkapkan disposisi staff- dimana staff ditempatkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
16	Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka	√	√	√		√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
17	Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. Penjualan per tenaga kerja						√	√	√	√		√	√	√		√						√							
18	Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
19	Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja																				√								
20	Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
21	Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
22	Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
23	Membuat laporan tenaga kerja terpisah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
24	Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√		√	√		√	√		√	√	√	√					
25	Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja																												
26	Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan																												
27	Peningkatan kondisi kerja secara umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
28	Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja	√				√		√	√		√	√	√	√	√	√	√		√	√									
29	Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja	√				√					√	√		√	√	√													
	Produk																												
1	Pengungkapan informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

6	Membiyai program beasiswa			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√							√						
7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat		√						√		√		√	√			√			√		√	√						
8	Mensponsori kampanye nasional		√	√	√		√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
9	Mendukung pegembangan industri lokal							√	√	√	√		√	√				√	√			√	√						
	Umum																												
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Total item yang diharapkan diungkapkan	53	55	58	53	52	57	61	55	46	58	55	64	70	57	54	56	55	47	62	54	60	56	54	54				

MISCELLANEOUS 2007

No	Kategori	K	M	E	P	P	T	S	G	I	S	I	A	A	P	V	I	S	S	U	N	G	C	P	G	P	T		
		M	A	X	F	I	F	B	T	K	T	R	O	I	P	E	S	N	I	T	P	Y	T	I	T	A	P		
	Lingkungan	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi			√	√	√		√	√			√	√	√		√		√	√	√		√	√		√	√			
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkunngan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√				√	√				√	√	√		
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas						√	√					√	√															
6	Penggunaan material daur ulang												√	√															
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan						√	√	√					√						√	√	√							
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lngkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√							√	√	√		√	√			√	√											
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah								√		√		√									√					√		

6	Membiyai program beasiswa			√		√	√	√		√	√	√	√	√	√	√										√		
7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat		√						√				√	√					√		√	√			√	√		
8	Mensponsori kampanye nasional		√	√	√		√	√	√		√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
9	Mendukung pegembangan industri lokal								√	√	√		√	√				√		√	√					√		
Umum																												
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Total item yang diharapkan diungkapkan	48	47	54	47	48	52	56	54	41	55	50	62	70	52	49	50	46	43	56	48	55	52	47	49	48	53	

PROPERTY 2008

No	Kategori	A S R 08	B M S 08	B D M 08	D P W 08	L K C 08	L C R 08	S C T 08	J R P 08	I P P 08	M D R 08	P J T 08	S I P 08	R B M 08	S S I 08	D Y A 08	S D M 08	W K Y 08	B I P 08	C D M 08	C T D 08	K I J 08	D G I 08	C T P 08	J K M 08	S R A 08	T M E 08	T B P 08	A K Y 08
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas	√		√		√	√	√	√	√	√		√		√	√	√	√			√	√		√		√			
6	Penggunaan material daur ulang				√		√	√													√	√							
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan			√		√	√			√				√				√				√					√	√	√
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√		√	√	√	√
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah		√	√		√	√		√				√	√		√		√			√	√			√	√		√	√

PROPERTY 2009

No	Kategori	A S R 09	B M S 09	B D M 09	D P W 09	L K C 09	L C R 09	S C T 09	J R P 09	I P P 09	M D R 09	P J T 09	S I P 09	R B M 09	S S I 09	D Y A 09	S D M 09	W K Y 09	B I P 09	C D M 09	C T D 09	K I J 09	D G I 09	C T P 09	J K M 09	S R A 09	T M E 09	T B P 09	A K Y 09
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamai daratan atau reboisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas	√		√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			
6	Penggunaan material daur ulang					√		√	√													√	√						
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan			√			√	√			√				√			√				√					√	√	√
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah	√	√	√		√	√	√	√		√		√	√		√		√			√	√		√	√	√		√	√

PROPERTY 2007

No	Kategori	A S R 07	B M S 07	B D M 07	D P W 07	L K C 07	L C R 07	S C T 07	J R P 07	I P P 07	M D R 07	P J T 07	S I P 07	R B M 07	S S I 07	D Y A 07	S D M 07	W K Y 07	B I P 07	C D M 07	C T D 07	K I J 07	D G I 07	C T P 07	J K M 07	S R A 07	T M E 07	T B P 07	A K Y 07
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√		√	√		√
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi	√		√		√		√	√	√	√				√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas	√		√		√	√	√	√	√	√		√		√	√	√	√			√	√				√			
6	Penggunaan material daur ulang				√		√	√													√	√							
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan			√		√	√			√					√			√				√					√	√	
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√		√	√	√	√
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah			√		√			√							√		√				√	√			√			

TABEL CONSUMER GOOD INDUSTRI 2008

No	Kategori	B M S 08	M R U 08	U J M 08	K F A 08	K M F 08	M I N 08	D V L 08	I S M 08	U L R 08	M B I 08	B A T 08	C K R 08	D M A 08	D D T 08	M I H 08	S L T 08	S B I 08	M R C 08	K I C 08	K S I 08	L M I 08	A G M 08	P F A 08	I F A 08	G G M 08	H M S 08	S L B 08	S T P 08	
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√		√	√			√	√	√	√	√	√		
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi	√	√	√	√		√	√	√		√	√					√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas	√		√			√			√	√	√							√√				√				√	√		
6	Penggunaan material daur ulang						√																							
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan	√		√																			√				√			
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√	√	√	√	√	√			√		√		√	√	√			√			√	√		√	√	√	√	√	
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah	√		√		√		√	√	√		√			√	√		√	√				√			√	√	√	√	

6	Membiyai program beasiswa	√		√	√		√			√								√				√			√		√		
7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat		√				√		√	√		√			√		√			√	√		√	√		√	√		
8	Mensponsori kampanye nasional	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√			√	√			√	√		√	√	√	√	√		√	
9	Mendukung pegembangan industri lokal	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√			√	√	√	√	
	Umum																												
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Total item yang diharapkan diungkapkan	61	56	60	57	56	60	52	59	62	54	59	50	45	53	55	54	44	58	47	49	46	62	49	54	56	55	60	48

6	Membiyai program beasiswa	√		√	√		√			√								√				√			√		√		
7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat		√		√		√	√	√	√		√		√	√	√		√	√	√		√	√		√	√			
8	Mensponsori kampanye nasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√		√		
9	Mendukung pegembangan industri lokal	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√			√	√	√	√	√	
	Umum																												
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Total item yang diharapkan diungkapkan	64	59	62	58	59	62	54	60	64	57	60	52	49	54	57	56	47	60	50	53	51	64	50	55	56	57	61	51

6	Membiyai program beasiswa	√		√	√		√			√								√				√			√		√		
7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat		√				√		√	√		√				√			√	√		√	√		√	√			
8	Mensponsori kampanye nasional	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√		√	√		√	√	√	√	√		√		
9	Mendukung pegembangan industri lokal	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√				√	√	√	√	
	Umum																												
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Total item yang diharapkan diungkapkan	54	51	55	56	54	60	49	57	61	53	56	46	41	48	51	48	41	53	40	44	43	56	44	48	50	51	51	44

No	Kategori	M I C 08	L S 08	M I 08	M P 08	C I S 08	T R N 08	K I A 08	T A T 08	M P F 08	P J A 08	P I R 08	M A P 08	R C L 08	S T I 08	R L S 08	A H I 08	H A P 08	T R S 08	U T R 08	R U I 08	F I S 08	A G S 08	T G A 08	W P M 08	O P D 08	I C P 08	C O L 08	G M C 08
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√		√	√
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan ligkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamai daratan atau reboisasi	√	√	√		√	√		√		√	√				√		√		√	√				√	√	√	√	
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas		√							√	√									√					√	√			
6	Penggunaan material daur ulang		√		√					√	√									√									
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan										√									√					√				
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lngkungan	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan				√			√	√		√	√	√			√			√	√		√		√	√	√	√		
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah		√		√						√	√	√	√		√				√	√			√	√	√		√	√

No	Kategori	M I C 09	L S 09	M M I 09	M P P 09	C I S 09	T R N 09	K I A 09	T A T 09	M P F 09	P J A 09	P I R 09	M A P 09	R C L 09	S T I 09	R L S 09	A H I 09	H A P 09	T R S 09	U T R 09	R U I 09	F I S 09	A G S 09	T G A 09	W P M 09	O P D 09	I C P 09	C O L 09	G M C 09	
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√		√	√		
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan ligkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamai daratan atau reboisasi	√	√	√		√	√		√	√	√		√		√		√			√	√	√			√	√	√	√	√	
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas		√						√	√										√					√	√				
6	Penggunaan material daur ulang		√		√				√	√										√										
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan									√										√					√					
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lngkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	√		√	√			√	√		√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah	√	√		√		√		√		√	√	√		√					√	√			√	√	√		√	√	

No	Kategori	M T P 08	M T G 08	L C I 08	M N C 08	S C M 08	J S I 08	M D E 08	P S W 08	P S A 08	P A S 08	P P L 08	H S J 08	I C I 08	B B N 08	D T N 08	J H D 08	T I M 08	J A S 08	B A B 08	A G H 08	A K R 08	F K A 08	J T P 08	I T G 08	A T T 08	P G I 08	E P M 08	A B S 08
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi		√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi				√	√	√	√	√		√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas						√		√	√	√	√					√	√		√	√								
6	Penggunaan material daur ulang								√												√	√							
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan											√									√	√	√	√		√			
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan		√		√		√		√	√	√	√			√	√	√	√		√	√	√					√	√	
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah		√		√	√	√			√	√			√		√		√	√	√	√	√	√				√	√	√

11	Pengolahan limbah								√	√	√	√					√	√		√	√	√	√	√			√				
12	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	Perlindungan lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	
	Energi																														
1	Menggunakan energy secara lebih efisien dalam kegiatan operasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Memfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi						√		√												√										√
3	Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang								√												√										√
4	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi	√	√	√			√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Pengungkapan peningkatan efisiensi energy dari produk	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk		√	√			√					√				√	√		√	√	√	√		√							
7	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan					√	√								√					√	√	√	√	√	√	√		√			
	Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja																														
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja	√			√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja																					√									
4	Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja			√		√	√	√	√		√					√			√	√	√			√	√		√	√			
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	√	√		√	√	√	√	√	√	√					√	√	√	√	√				√	√		√	√		√	√

No	Kategori	M T P 09	M T G 09	L C I 09	M N C 09	S C M 09	J S I 09	M D E 09	P S W 09	P S A 09	P A S 09	P P L 09	H S J 09	I C I 09	B B N 09	D T N 09	J H D 09	T I M 09	J A S 09	B A B 09	A G H 09	A K R 09	F K A 09	J T P 09	I T G 09	A T T 09	P G I 09	E P M 09	A B S 09	
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi			√	√	√	√	√	√		√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas						√		√	√	√	√					√	√		√	√					√				
6	Penggunaan material daur ulang								√											√	√									
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan											√								√	√	√	√			√				
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan		√	√	√	√	√		√	√	√	√			√	√	√	√		√	√	√	√				√	√	√	
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah	√	√		√	√	√			√	√	√		√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	

No	Kategori	M T P 07	M T G 07	L C I 07	M N C 07	S C M 07	J S I 07	M D E 07	P S W 07	P S A 07	P A S 07	P P L 07	H S J 07	I C I 07	B B N 07	D T N 07	J H D 07	T I M 07	J A S 07	B A B 07	A G H 07	A K R 07	F K A 07	J T P 07	I T G 07	A T T 07	P G I 07	E P M 07	A B S 07
	Lingkungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangn untuk pengurangan polusi		√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√		√	√		√	√	√			√				
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hokum dan peraturan polusi	√	√	√	√	√	√	√	√			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	√		√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi				√	√	√		√		√	√	√				√	√	√	√	√				√			√	√
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas						√		√	√	√	√					√	√		√	√								
6	Penggunaan material daur ulang								√												√	√							
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang di buat perusahaan											√									√	√		√					
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan		√		√		√		√	√	√	√			√		√			√	√	√						√	
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah				√		√			√	√					√				√	√		√						

